



SEMANGAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Laporan Tahunan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) 2021

PERJALANAN TEMA LAPORAN



Laporan Tahunan
Program Kemitraan
& Bina Lingkungan
(PKBL) 2020

Bersama Menghadapi Tantangan

Pandemi COVID-19 yang dapat menular antar manusia serta belum ada obat penangkalnya melanda terkonfirmasi Indonesia sejak awal Maret 2020. Untuk mencegah penyebarannya, Pemerintah Indonesia kemudian memilih memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai alternatif pencegahan, dibandingkan kebijakan lockdown yang diberlakukan di berbagai negara.

Kedua pilihan kebijakan tersebut sama-sama memberi dampak lain yang tidak dapat dihindari, yakni tertekannya perekonomian global maupun nasional sehingga akhirnya memasuki masa resesi, yang kemudian membuat tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan bertambah. Seluruh rangkaian tersebut pada akhirnya membuat tahun 2020 menjelma menjadi tahun krisis multi dimensi, sebagai suatu tantangan yang harus diatasi bersama-sama.

PGN sebagai salah satu Perusahaan di bidang energi terkemuka dengan kegiatan operasional meliputi berbagai wilayah Indonesia

selama ini aktif turut mendukung upaya Pemerintah Indonesia memeratakan hasil pembangunan dengan melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kemasyarakatan melalui kerangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terencana, terukur dan selaras dengan upaya pencapaian tujuan keberlanjutan SDGs.

Mempertimbangkan beratnya krisis multi dimensi yang harus diatasi, PGN kemudian menambahkan kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 sebagai salah satu fokus kegiatan Program Bina Lingkungan, agar bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat, warga korporasi nasional maupun BUMN lainnya dapat bahu-membahu bersama Pemerintah Indonesia, mengatasi penyebaran dan mengendalikan dampak pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. PGN meyakini dengan semangat kebersamaan kita, akan dapat mengatasi tantangan pandemi, dan kembali melanjutkan pembangunan bangsa.



Laporan Tahunan
Program Kemitraan
& Bina Lingkungan
(PKBL) 2019

Open to a Sustainability World

After 55 years of experience in delivering clean and affordable energy, PGN continues to build a strong reputation as a company that embraces and works toward sustainability. In addition, we pursue growth by building on infrastructure, especially after we received the trust to serve as Pertamina's Gas Subholding in 2019.

For the purpose of sustainability, we invest time and effort in building successful partnership with customer, suppliers, as well as communities in Indonesia and abroad. We are dedicated to open to a sustainable world, record business-scale growth, and support improved environmental quality through development of the natural gas and energy business for all stakeholders.



Laporan Tahunan Program
Kemitraan & Bina Lingkungan
(PKBL) 2018

Doors of Community Development

Melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) terbuka peluang bagi PGN untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Terutama sekitar daerah operasi perusahaan melalui berbagai program kemasyarakatan yang pada gilirannya menjadi "license to operate" bagi eksistensi PGN di wilayah tersebut.

Sejalan dengan PKBL, peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat marginal didapatkan pula dari pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PGN.

Kedua program ini saling berhubungan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).



SEMANGAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dengan semangat pembangunan berkelanjutan, PGN sebagai Perusahaan yang berpengalaman panjang di bidang energi dengan kegiatan operasional meliputi berbagai wilayah Indonesia, siap untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dalam menjalankan aktivitas operasinya, PGN mengintegrasikan konsep keberlanjutan dengan mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian alam sebagai penyangga kehidupan, serta penerapan tata kelola yang baik yang mengedepankan etika dan integritas.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas bisnis Perusahaan. Melalui program TJSL, PGN bercita-cita untuk menciptakan nilai bersama dan manfaat yang luas kepada seluruh pemangku kepentingan,

termasuk Negara, masyarakat, serta lingkungan. Pelaksanaan TJSL di PGN berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang diharapkan tercapai pada Tahun 2030.

Salah satu fokus utama TJSL pada Tahun 2021 adalah pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. COVID-19, yang telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non-alam yang disebabkan oleh wabah, memberikan dampak yang sangat signifikan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. PGN hadir untuk membantu Pemerintah dalam pemulihan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dalam bentuk pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Dengan semangat pembangunan berkelanjutan, PGN tetap optimis menghadapi tantangan pandemi dan terus bertumbuh dan memberikan manfaat yang luas.

DAFTAR ISI

1	Deskripsi Tema Laporan 2021	6	Ikhtisar Kinerja TJSL
4	Testimoni Penerima Manfaat Program TJSL	10	Laporan Direktur Utama

02.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 13 dan Pembangunan Berkelanjutan

14	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	20	TJSL dan Pembangunan Berkelanjutan
18	Landasan Hukum TJSL	21	TJSL dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks PGN
18	Dari PKBL ke TJSL		

03.

27 Pengelolaan TJSL di PGN

28	Kebijakan Umum TJSL	34	Pemetaan 6 Prioritas TPB
28	Divisi Pengelola TJSL	35	Peristiwa Penting (Terkait TJSL)
30	Dana TJSL	37	Penghargaan
31	Klasifikasi Program TJSL Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		

04.

39 Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil

- 40 Sekilas Tentang PUMK
- 40 Pengalihan Pengelolaan Dana
- 41 Peralihan Program Kemitraan Menjadi Program Pendanaan UMK
- 42 Kolektibilitas Pinjaman
- 43 Pemulihan Pinjaman
- 45 Fokus Ke Depan

05.

47 Pilar Ekonomi

- 48 Sekilas Pilar Ekonomi
- 50 Anggaran Dana dan Realisasi Pilar Ekonomi Tahun 2021
- 50 Realisasi Tahun 2021
- 50 Program-program Tahun 2021

06.

57 Pilar Lingkungan

- 58 Sekilas Pilar Lingkungan
- 61 Anggaran dan Realisasi Pilar Lingkungan Tahun 2021
- 62 Program-program Tahun 2021

07.

65 Pilar Sosial

- 66 Sekilas Pilar Sosial
- 66 Anggaran dan Realisasi Pilar Sosial Tahun 2021
- 67 Program-program Tahun 2021

08.

Pilar Hukum dan

71 Tata Kelola

- 72 Sekilas Pilar Hukum dan Tata Kelola

09.

77 Lain-lain

- 78 Nama Auditor/KAP, Temuan Auditor, Jenis Pemeriksaan, dan Opini Selama 2 (Dua) Tahun Terakhir
- 78 Tindak Lanjut atas Temuan Auditor dan Temuan Auditor yang Belum Dilaksanakan Selama 2 (Dua) Tahun Terakhir
- 78 Tindak Lanjut Arahan RUPS, Kementerian BUMN, dan Dewan Komisaris/ Pengawas atas TJSL
- 82 Laporan Auditor Independen

TESTIMONI PENERIMA MANFAAT PROGRAM TJSL



Bapak Muhammad Heli Rofikun,
Kepala Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang

Salam Borobudur Gumregah, Salam Karangrejo Muncar

Karangrejo adalah salah satu dari dua puluh desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Kami, pemerintah desa dan masyarakat sepakat bahwa Karangrejo harus dijadikan penopang keberadaan Candi Borobudur. Desa kami memiliki berbagai objek wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Punthuk Setumbu, Gereja Ayam, Kebun Buah, dan juga Balai Ekonomi Desa (Balkondes). Balkondes merupakan sebuah program bentukan BUMN yang dimanfaatkan sebagai sebuah etalase bagi perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PAD) bagi Pemerintah Desa Karangrejo.

PGN telah mensupport pengembangan pariwisata di desa kami berupa pembuatan

Balkondes dan pengembangan spot-spot pariwisata baru yang sangat bermanfaat bagi desa kami. Salah satu manfaat yang dirasakan adalah penambahan mata pencaharian, dimana warga yang dulunya tidak memiliki pekerjaan sekarang bekerja di Balkondes.

Selain itu, Kami juga dibantu dalam pemasangan aliran gas ke rumah warga. Sampai saat ini, 250 rumah di Desa Karangrejo telah teraliri oleh gas. Hal ini merupakan sebuah hal baru di desa kami. Tentu ini sangat bermanfaat untuk memberikan solusi pada warga yang seringkali kesulitan mendapatkan Gas Tabung LPG. Aliran gas ini juga membantu dalam mengembangkan UMKM masyarakat di Desa Karangrejo.



IKHTISAR KINERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PGN berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis Perusahaan.”

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

- Komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan
- Memberikan manfaat pada, sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola
- Prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan
- Bagian dari pendekatan bisnis perusahaan
- Berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- Berpedoman kepada ISO 26000



Program Pilar Sosial



Program Pilar Ekonomi



Program Pilar Lingkungan



Program Pilar Hukum dan Tata Kelola



Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (PUMK)

PUMK adalah Program pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil khususnya bagi usaha binaan BUMN. Per tahun 2021, PGN memiliki 222 mitra binaan serta 215 mitra BUMN Sinergi. Dana yang tersedia untuk PUMK pada awal tahun adalah Rp12.000.486.179 (teralisasi sebesar 99,4% dari rencana).

Uraian	2021	2020
Saldo Awal	Rp12.000.486.179	Rp9.322.251.000

PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pada periode pelaporan, jumlah pembayaran pinjaman dari mitra binaan sejumlah Rp78.445.660 (terrealisasi sebesar 65,37% dari rencana) serta jumlah pengembalian dana dari BUMN Pembina lain/Lembaga Penyalur mencapai Rp36.000.000 (terrealisasi sebesar 3% dari rencana). Hal ini dikarenakan terdapat kendala keuangan pada sinergi BUMN yang terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19. Adapun Kami juga menerapkan Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman sesuai arahan Kementerian BUMN untuk membantu pemulihan kondisi finansial BUMN Sinergi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, terdapat BUMN Sinergi yang mengalami restrukturisasi organisasi/peleburan yang mengakibatkan kendala penagihan. Namun begitu, Kami tetap konsisten dalam menjalankan strategi pemulihan piutang. Kami optimis, dengan perbaikan terhadap kondisi pandemi COVID-19 akan mampu memperbaiki kinerja pengembalian pinjaman di masa yang akan datang.

Uraian	2021	2020
Pengembalian Pinjaman Dari Mitra Binaan	Rp78.445.660	-
Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur	Rp36.000.000	Rp579.956.000

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA PUMK

Sejak tahun 2016, berdasarkan kebijakan perusahaan, PGN tidak lagi menyalurkan dana pinjaman kepada mitra binaan. PGN juga tidak lagi melakukan penyisihan dana dari laba tahun sebelumnya. PGN berfokus pada upaya penagihan pengembalian pokok pinjaman. Pada tahun pelaporan, kami telah merencanakan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro kecil melalui sinergi BUMN atau entitas lainnya. Namun demikian, Kami menilai situasi dan kondisi pandemi selama Tahun 2021 belum kondusif untuk mendukung penyaluran dana tersebut. Pada Bulan Juni-Juli 2021, Indonesia kembali dilanda gelombang kedua lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta. Sehingga, Pemerintah kembali menerapkan PPKM darurat serta PPKM berbasis level. Hal ini turut membatasi ruang gerak kami dalam melakukan penyaluran dana kepada BUMN Khusus maupun dalam melakukan kegiatan Pembinaan kepada para mitra binaan. Sehingga, pada tahun pelaporan Kami fokus pada persiapan rencana penyaluran tahun anggaran berikutnya serta melakukan penyempurnaan terhadap prosedur manual TJSL yang mengakomodir PER-05/MBU/04/2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Kami optimis pada Tahun berikutnya, Kami akan mampu menyalurkan dana PUMK secara efektif melihat kondisi pandemi COVID-19 yang semakin menunjukkan perbaikan.

KOLEKTABILITAS PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN

Kami tetap berfokus kepada pemulihan kualitas pinjaman sesuai dengan strategi yang telah Kami susun. Namun demikian, mengingat situasi kondisi pandemi yang berdampak signifikan pada kondisi finansial mitra binaan, Kami menjalankan beberapa kebijakan sesuai arahan Kementerian BUMN, dimana Kami menerapkan Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pendanaan UMK serta Kebijakan Penundaan Pembayaran Kewajiban Angsuran Pinjaman Pendanaan UMK. Hal ini Kami lakukan untuk mengurangi beban para mitra binaan serta membantu dalam pemulihan kondisi finansial UMK akibat pandemi COVID-19.

Rasio kolektabilitas pada tahun pelaporan sebesar 0% yang dihitung dari pengembalian pinjaman mitra binaan lama.

Uraian	2021	2020
Jumlah Piutang	7.245.215.650	13.137.253.625
Kategori Lancar	-	-
Kategori Kurang Lancar	-	-
Kategori Diragukan	-	-
Kategori Macet	7.245.215.650	13.137.253.625
Rasio Kolektabilitas	0	0

PROGRAM 4 PILAR TJSL

Pada tahun pelaporan, PGN mengeluarkan total dana Rp49.422.853.067 (terrealisasi 95% dari rencana) untuk Program-program TJSL pada pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola. Pada tahun pelaporan, PGN masih berfokus pada program-program pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 akibat situasi pandemi yang masih berlangsung dan sempat memasuki gelombang kedua lonjakan kasus COVID-19 akibat varian delta. Sepanjang periode pelaporan, total bantuan COVID-19 yang disalurkan oleh PGN Group kepada masyarakat mencapai Rp15,6 miliar.

PGN juga berfokus kepada pelaksanaan program Desa Binaan di Desa Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan melalui peningkatan pengetahuan, pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat desa; serta menyediakan akses atau permodalan melalui koperasi dan Unit BUMDES untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Program Desa Binaan telah memberikan manfaat kepada 3.655 warga desa Binaan serta memperoleh angka IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Desa binaan Station Pagardewa sebesar 91,35 dengan predikat "Sangat puas".



91,35 (Sangat Puas)

Indeks Kepuasan Masyarakat



Rp49.422.853.067

Penyaluran Dana Program 4 Pilar TJSL

KANTOR
YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-FURQAN
Lebeng Barat-Pasongsongan-Sumenep



LAPORAN DIREKTUR UTAMA



Melalui Laporan TJSL ini, Pemegang saham dapat menilai fokus dan kontribusi kami dalam pelaksanaan TJSL yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).



Muhammad Haryo Yuniarto
Direktur Utama

Para pemegang saham yang terhormat,

Kami kembali menyampaikan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2021. Laporan ini memuat kinerja PGN dalam melaksanakan Program TJSL pada periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021. Melalui Laporan TJSL ini, Pemegang saham dapat menilai fokus dan kontribusi kami dalam pelaksanaan TJSL yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaan TJSL pada tahun ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diubah menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pergantian ini dimaksudkan agar program TJSL bersifat lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya, serta berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam pelaksanaan TJSL ini, terdapat Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang dahulu disebut Program Kemitraan (PK). Kemudian terdapat program-program yang dahulu disebut Program Bina Lingkungan (BL) yang berorientasi pada 7 aspek yang diatur oleh Pemerintah, kini diarahkan untuk berfokus kepada 4 Pilar, yaitu: Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola. 4 pilar ini kemudian dipetakan kedalam poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Sesuai dengan kebijakan perusahaan dan arahan Pemegang Saham, sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2021 ini kami kembali tidak menyalurkan dana PUMK kepada mitra binaan secara langsung. Pada Tahun 2019, PGN menghibahkan portofolio kelolaan kepada PT PNM sebagai BUMN khusus sebesar Rp177,97 miliar. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan RUPS Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PerMen BUMN) Republik Indonesia No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus. Dengan penghibahan portofolio kelolaan tersebut, maka dana yang tersedia untuk PGN kelola secara mandiri per akhir tahun 2019 berjumlah Rp9.322.251.000. Per awal tahun 2021, jumlah tersebut telah meningkat sebesar 29%, yaitu Rp12.000.486.179. Peningkatan ini berasal dari berbagai penerimaan, termasuk penerimaan pengembalian pinjaman dari mitra binaan dan BUMN

Pembina Lain/Lembaga Penyalur. Pada tahun pelaporan, kami berfokus pada upaya pemulihan kualitas pinjaman, terutama untuk piutang bermasalah.

Pada tahun pelaporan, PGN mengeluarkan total dana Rp49.422.853.067 (terrealisasi 95% dari rencana) untuk Program-program TJSL pada pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola. Program-program TJSL dikelola dengan mengikuti alur tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi. Kami melakukan analisa terhadap dampak dan risiko dari aktivitas operasional, melakukan pemetaan sosial untuk mengetahui kondisi *existing* serta kebutuhan masyarakat, menyesuaikannya dengan SDGs, serta melakukan pelibatan pemangku kepentingan. Pelaksanaan Program TJSL mengacu pada rencana kerja, SOP, dan juga ISO 26000 tentang TJSL. Kami juga melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk mengukur suksesi program dan dampaknya terhadap masyarakat. Pada tahun pelaporan, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Desa Binaan menunjukkan nilai 91,35 dengan nilai mutu pelayanan kategori A dengan predikat Sangat Puas. Adapun pelaksanaan Program Desa Binaan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan telah memberikan manfaat kepada 3.655 warga desa Binaan. Hingga saat ini, PGN telah memiliki 5 Desa Binaan yang akan terus kami kembangkan secara konsisten.

Ke depan, Kami akan terus berfokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian alam sebagai penyangga kehidupan. Kami akan terus berorientasi pada pencapaian TPB/SDGs yang direncanakan tercapai pada 2030.

Sebagai penutup, atas nama Direksi, Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung upaya peningkatan kinerja TJSL di Tahun 2021.

Jakarta, 31 Maret 2022

Muhammad Haryo Yunianto
Direktur Utama



BAB 2

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

“Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan perwujudan dari komitmen kami untuk terus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami terus menciptakan manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjaga kelestarian alam sebagai penyangga kehidupan manusia”

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Makna dan Tujuan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program TJSL, adalah kegiatan yang merupakan komitmen PGN terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) dengan memberikan manfaat pada Sosial, Ekonomi, Lingkungan serta Hukum dan Tata Kelola, dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis PGN.

Program TJSL bertujuan untuk:

- Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
- Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- Membina usaha mikro dan usaha kecil serta masyarakat sekitar operasi perusahaan agar lebih tangguh dan mandiri.

Prinsip-Prinsip Program TJSL

Program TJSL di PGN, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi hasil program, dilaksanakan dengan berpegang pada 4 (empat) prinsip berikut:



Pilar Pelaksanaan Program TJSL

Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:





Tahapan Pelaksanaan TJSL

Program TJSL di PGN dilakukan secara sistematis, terpadu, serta berpedoman pada rencana kerja agar tujuan program dapat terpenuhi. Terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaan TJSL, yakni:



Tahap Perencanaan

Perencanaan mencakup penyusunan strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan Program TJSL. Pada tahap perencanaan, pertama-tama Kami melakukan analisa terhadap dampak dan risiko dari aktivitas operasional kami. Seluruh dampak eksternalitas akan kami susun perencanaan mitigasi dan pengelolaannya sehingga tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat. Kemudian, Kami melakukan pemetaan sosial untuk mengetahui kondisi *existing* serta kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan penyusunan rencana program, Kami juga mempertimbangkan kearifan lokal dan potensi daerah serta mendengarkan masukan serta dampak yang diharapkan oleh masyarakat. Kami terbuka terhadap saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah daerah setempat, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya. Program yang dirancang juga disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, karena orientasi dari pelaksanaan TJSL adalah pencapaian tujuan berkelanjutan yang terarah dan terukur.

Perencanaan kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Program TJSL yang harus dilaporkan secara berkala kepada Kementerian BUMN melalui portal Kementerian BUMN.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya adalah Pelaksanaan Program TJSL. Pelaksanaan Program mengacu kepada rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS/Menteri. PGN telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan Program TJSL. Pada tahun pelaporan, Kami mengupayakan penyempurnaan SOP TJSL yang mengacu kepada peraturan terbaru terkait Pelaksanaan TJSL BUMN yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan Permen tersebut, Pelaksanaan Program TJSL di PGN, ditopang oleh Program Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) serta 4 (empat) pilar, yaitu: Sosial, Ekonomi, Lingkungan serta Hukum dan Tata Kelola.



- Program Pendanaan UMK merupakan program pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil khususnya bagi usaha binaan BUMN. Usaha mikro dan kecil tersebut haruslah berdiri sendiri, serta tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, dengan usaha menengah atau usaha besar. Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:
 1. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah maksimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Program Pilar Sosial mencakup seluruh upaya untuk memenuhi hak dasar manusia serta meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk seluruh masyarakat.
- Program Pilar Ekonomi adalah program-program yang disusun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, diantaranya melalui penciptaan peluang usaha, pembangunan infrastruktur, inovasi, industri yang inklusif, serta penyediaan atau penggunaan energi bersih yang terjangkau.
- Program Pilar Lingkungan mencakup program-program pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan untuk menjaga keberlangsungan bumi dan seluruh kehidupan di dalamnya.
- Program Hukum dan Tata Kelola mencakup program-program terkait kepastian hukum dan tata kelola yang baik untuk menciptakan stabilitas keamanan dan keteraturan.

Dalam pelaksanaan TJSL, kami melakukan pengelolaan secara mandiri dan juga bekerjasama dengan mitra, yang terdiri dari BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN, maupun Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Tahap Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL untuk menjamin pelaksanaan TJSL yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Secara berkala, Kami melakukan evaluasi untuk mengukur kinerja dan capaian serta dampak dan manfaat dari Program TJSL kepada masyarakat, lingkungan, maupun kepada Perusahaan.

Selain itu, kami juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program TJSL setiap tahun kepada Kementerian BUMN melalui portal Kementerian BUMN. Kami juga menyampaikan Laporan TJSL kepada publik melalui Laporan Keuangan TJSL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Laporan Tahunan TJSL, Laporan Tahunan, maupun Laporan Berkelanjutan.



LANDASAN HUKUM TJSL

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PGN mengacu kepada berbagai peraturan perundangan yang diamanatkan oleh Negara, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 06 Agustus 2007 Perihal Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang: Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2012 Tanggal 4 April 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2012 tanggal 11 Mei 2012.
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang: Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, serta Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahannya Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN.
10. Nota Dinas Nomor 024400.ND/HM.05/FIN/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal Kebijakan terkait pelaksanaan PKBL.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/ MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PerMen BUMN) Republik Indonesia No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus.
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

DARI PKBL MENJADI TJSL

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan tanggung jawab yang melekat pada PGN sebagai entitas anak perusahaan BUMN yang masih diperlakukan sebagai Badan Usaha Milik Negara dan berbentuk Perusahaan Publik. PGN menyadari perannya sebagai aktor pembangunan yang ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencita-citakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat dan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam sebagai penyangga kehidupan.

Dalam menjalankan TJSL, PGN berpedoman kepada berbagai peraturan perundangan serta *best practice* dan standar nasional maupun internasional. Sebagai BUMN, pelaksanaan TJSL diamanatkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Sampai dengan 8 April 2021, PGN menjalankan PKBL dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara per 8 April 2021, PGN pun mengacu kepada peraturan terakhir tersebut. Menurut peraturan terbaru terkait TJSL, Kegiatan PKBL diganti menjadi TJSL.

Transisi PKBL Menjadi TJSL



Pergantian ini dimaksudkan agar kegiatan terkait dengan investasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh seluruh BUMN dapat dijalankan dengan berorientasi kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis perusahaan.

Adapun penyaluran program bina lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh PGN dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri terbaru (per 8 April 2021), tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran bina lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri BUMN.

TJSL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi pelaksanaan SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengesahan peraturan tersebut merupakan perwujudan dari komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, dibutuhkan kerjasama dari seluruh aktor pembangunan melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur.

Dalam hal ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut mengamanatkan seluruh BUMN untuk melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya. Bagi seluruh BUMN termasuk PGN, implementasi TJSL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terintegrasi dengan aktivitas operasi Perusahaan serta wujud kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menurut *the Brundtland Report* yang dikeluarkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Bagi kehidupan manusia, keberlanjutan terkait dengan pemenuhan kebutuhan jangka panjang, yang bergantung pada pemeliharaan alam dan sumber daya alam sebagai penyangga kehidupan. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraannya, manusia melakukan upaya pembangunan. Pembangunan yang tidak berorientasi pada kelestarian alam akan mengganggu keseimbangan alam yang pada akhirnya mengancam kehidupan yang ada di bumi. Untuk itu, diperlukan upaya pembangunan yang mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan manusia dengan pemeliharaan alam. Agar Pembangunan Berkelanjutan memiliki sasaran dan target yang harus dicapai dengan jelas, maka ditetapkanlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat target dari Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia yang berisi target pembangunan terkait dimensi Sosial, Ekonomi, Lingkungan serta Hukum & Tata Kelola. Harapannya, pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola untuk meningkatkan kualitas hidup antar generasi; dengan tetap menjaga kelestarian alam sebagai penyangga kehidupan.

TPB terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang telah mulai diimplementasikan pada Tahun 2015 dan diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2030. TPB merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir pada Tahun 2015. Adapun 17 tujuan TPB dan rumusannya adalah:

- (1) Tanpa Kemiskinan;
Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
- (2) Tanpa Kelaparan;
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
- (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.
- (4) Pendidikan Berkualitas;
Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.
- (5) Kesetaraan Gender;
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.
- (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.
- (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.
- (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.

- (10) Berkurangnya Kesenjangan;
Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.
- (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- (14) Ekosistem Lautan;
Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.
- (15) Ekosistem Daratan;
Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan keberlangsungan pemaknaan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
- (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh;
Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak termasuk untuk lembaga, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
- (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

PGN berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap TPB melalui *excellent operation* dalam aktivitas operasional Perusahaan serta pelaksanaan Program TJSL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasi Perusahaan.

TJSL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KONTEKS PGN

PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") merupakan subholding gas PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang transmisi dan niaga gas bumi di Indonesia.

Grup PGN digolongkan menjadi beberapa unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki segmen operasi sebagai berikut:

1. Segmen usaha niaga dan transmisi: Segmen ini melakukan kegiatan niaga dan transmisi gas bumi untuk pelanggan industri, komersial dan rumah tangga serta regasifikasi *liquefied natural gas*.

Pada bidang niaga gas bumi, PGN membeli gas bumi dari berbagai Produsen gas bumi yang kemudian dijual ke berbagai segmen pengguna akhir gas bumi, mulai dari Pelanggan Rumah Tangga, Pelanggan Komersial dan Industri, Pelanggan Pembangkit Listrik hingga ke Sektor Transportasi baik melalui moda pipa distribusi gas bumi, CNG maupun LNG.

Pada bidang bisnis transportasi atau transmisi gas bumi, PGN menyediakan fasilitas/infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik gas (*shipper*), sehingga gas bumi dapat dialirkan secara aman dan handal.

2. Segmen eksplorasi dan produksi minyak dan gas: Segmen ini melakukan kegiatan usaha dalam eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

Pada bidang usaha di hulu minyak dan gas bumi, PGN melalui PT Saka Energi Indonesia mengelola 10 (sepuluh) wilayah kerja domestik dan 1 (satu) wilayah kerja internasional.

3. Segmen usaha lainnya: Segmen operasional lainnya terkait dengan jasa sewa fiber optik untuk penyediaan jaringan dan jasa konstruksi dan perbaikan kepada pelanggan serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan.

Segmen usaha lainnya yang terkait Jasa sewa fiber optik dikelola oleh PT PGAS Telekomunikasi Nusantara.

Operasi bisnis PGN serta kegiatan TJSL yang dilakukannya, turut berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut UNDP dalam Dokumen *Mapping the Oil and Gas Industry to The Sustainable Development Goals: An Atlas* yang dikeluarkan pada Tahun 2017, sektor industri minyak dan gas bumi memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap 17 TPB sebagai berikut:

Aktivitas Operasi Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu untuk Sektor Minyak dan Gas Bumi
	Tanpa Kemiskinan	- Pembangunan Lokal - Perubahan Iklim - Akses Energi
	Tanpa Kelaparan	- Penyesuaian Aktivitas - Perubahan Iklim - Penggunaan Infrastruktur Bersama
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	- Penilaian Dampak Kesehatan - Keselamatan Jalan - Proteksi Pekerja dan Komunitas
	Pendidikan Berkualitas	- Strategi Konten Lokal - Edukasi Tenaga Kerja - Pelatihan Teknologi
	Kesetaraan Gender	- Kebijakan yang Sensitif Terhadap Gender - Pengambilan Keputusan yang Inklusif - Kesempatan Pekerjaan untuk Perempuan
	Air Bersih dan Sanitasi Layak	- Strategi Air - Efisiensi Penggunaan Air - Manajemen Risiko Air
	Energi Bersih dan Terjangkau	- Gas Alam - Efisiensi Energi - Energi Alternatif
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	- Penilaian Kompetensi - Tenaga Kerja Lokal - Pertumbuhan Tenaga Kerja & Supplier
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	- Infrastruktur Berkelanjutan - Penggunaan Bersama Infrastruktur - Transfer Teknologi
	Berkurangnya Kesenjangan	- Penilaian Dampak - Transparansi - Pelibatan
	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	- Proteksi Warisan Budaya dan Alam - Penilaian Risiko Operasi - Perkotaan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu untuk Sektor Minyak dan Gas Bumi
	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	- Pengelolaan Limbah yang Efisien - Rantai Pasok yang Berkelanjutan - Penatagunaan Produk
	Penanganan Perubahan Iklim	- Kapasitas yang Tangguh dan Adaptif - Mitigasi Emisi - Perencanaan Strategis
	Ekosistem Lautan	- Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan - Penilaian Lingkungan - Minimalisasi Pengasaman Laut
	Ekosistem Daratan	- Pengelolaan Ekosistem - Hierarki Mitigasi - Offset Keanekaragaman Hayati
	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	- Pelibatan Komunitas - Anti-Korupsi - Hak Asasi Manusia
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	- Dialog & Koordinasi - Kapasitas Pemerintah - Energi Berkelanjutan

Untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh rantai nilai dan aktivitas operasi Perusahaan, PGN mengacu kepada berbagai peraturan perundangan serta inisiatif, standar, dan *best practice*. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan *excellent operation* untuk meningkatkan kontribusi terhadap pencapaian TPB.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas operasi Perusahaan, Kami juga menjalankan program TJSL yang dirancang selaras untuk mendukung pemenuhan TPB sebagai berikut:



Aktivitas operasi dan keseluruhan program TJSL yang dilakukan oleh PGN selaras dengan berbagai rumusan tujuan dalam TPB.

Dari segi bisnis utama Perusahaan, PGN telah berkontribusi terhadap TPB No 7 (Energi Bersih dan Terjangkau). Gas bumi memiliki peran penting dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang memicu pemanasan global sebagai transisi dari pemanfaatan energi fosil menuju energi terbarukan. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan transportasi dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi CO₂ secara signifikan. Gas bumi juga berperan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang

ditargetkan mencapai porsi 24% dalam bauran energi nasional tahun 2050. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi PGN untuk dapat mengoptimalkan segmen niaga dan transmisi gas bumi dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam rantai nilainya.

Program TJSL yang terdiri dari Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola telah dirancang agar selaras dan dapat berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan manfaat luas bagi peningkatan nilai Perusahaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian alam sebagai penyangga kehidupan.





BAB 3

PENGELOLAAN TJSL DI PGN

“Dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan visi untuk menjadi pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diakui secara luas, PGN berperan sebagai *Active Advisor* dan *Key Manager* untuk penyelenggaraan CSR yang terarah di seluruh PGN group.”

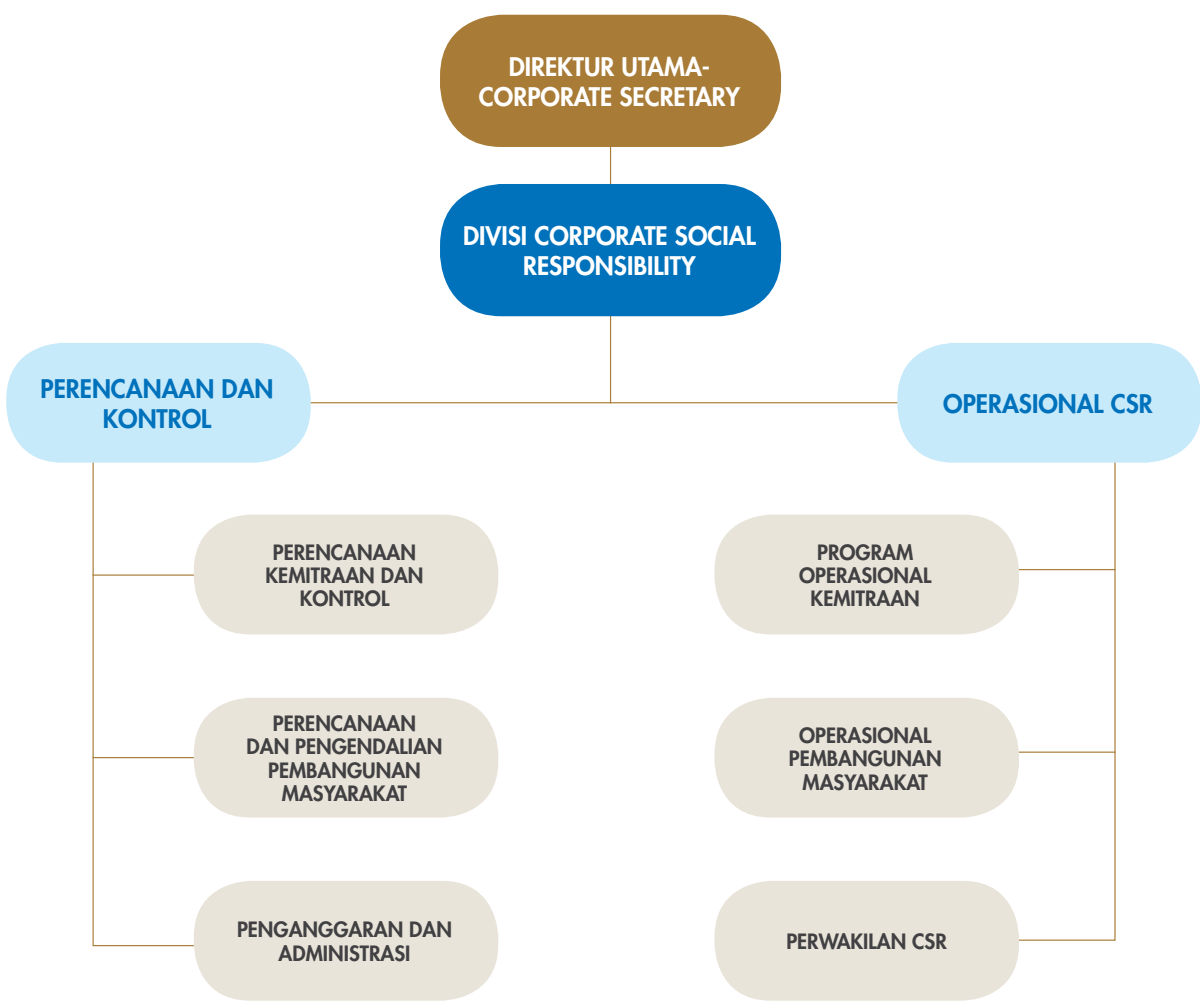
KEBIJAKAN UMUM TJSL

Dalam menjalankan program TJSL, PGN memiliki Kebijakan Penyaluran yang terdiri dari:

- 1. Mendukung kepentingan bisnis eksisting Perusahaan
- 2. Mendukung kegiatan pengembangan bisnis Perusahaan
- 3. Menjaga keamanan aset Perusahaan
- 4. Memberikan manfaat kepada *stakeholders*
- 5. Mendukung program Pemerintah

DIVISI PENGELOLA TJSL

Seluruh tahapan program TJSL yang terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, serta *Monitoring* dan Evaluasi dikelola oleh Divisi *Corporate Social Responsibility* (Divisi CSR). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 035500.K/OT.00/PDO/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi Dasar (BOD-2) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan Surat Penugasan *Division Head, Human Capital Management*, struktur organisasi CSR Division adalah sebagai berikut:



Berikut adalah visi, misi, dan moto Divisi CSR dalam penyelenggaraan TJSI di PGN:

VISI

Menjadi Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSI) yang diakui secara nasional.

MISI

- Berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian alam.
- Berkontribusi secara aktif pada pencapaian TPB/SDGs yang direncanakan tercapai pada Tahun 2030.

MOTO



Sejahtera, **H**armonis, **A**manah, **R**esponsif, **E**mpati

KOMITMEN POKOK

- Berkontribusi terhadap peningkatan **KESEJAHTERAAN** masyarakat
- Menciptakan hubungan **HARMONIS** dengan *Stakeholder*
- Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berkelanjutan merupakan **AMANAH**
- **RESPONSIF** terhadap masalah sosial masyarakat
- **EMPATI** terhadap masalah sosial masyarakat



pgn
energy for life
A member of Pertamina



Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2021 PT Perusahaan Gas Negara Tbk

KLASIFIKASI PROGRAM TJSL BERDASARKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program
	Tanpa Kemiskinan	Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.
	Kesetaraan Gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.
	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
	Berkurangnya Kesenjangan	Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

Program 4 Pilar Utama TJSL

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program TJSL
Sosial	Tanpa Kemiskinan 	Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.	- Bantuan Penanggulangan Pandemi COVID-19. - Bantuan Logistik dan Obat-obatan untuk Korban Bencana Alam. - Bantuan untuk Masyarakat Marginal. - Bantuan dalam Rangka Perayaan Keagamaan. - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Desa Binaan. - Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Ibadah.
	Tanpa Kelaparan 	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.	Bantuan Pangan dalam Rangka Perayaan Keagamaan (hewan qurban).

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program TJSL
	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan 	Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.	Bantuan Peralatan dan Fasilitas Kesehatan untuk Berbagai Rumah Sakit dan Institusi Lainnya.
	Pendidikan Berkualitas 	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.	- Berbagai Program Beasiswa. - Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Belajar.
	Kesetaraan Gender 	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Desa Binaan.
Ekonomi	Energi Bersih dan Terjangkau 	Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.	- Peluang Pengembangan Potensi Pendukung Operasi Perusahaan. - Bantuan pembangunan Sambungan Rumah, Konstruksi SR, Pengadaan Kompor di Balkondes Karangrejo
	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak 	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.	- Peluang Pengembangan Potensi Pendukung Operasi Perusahaan. - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Desa Binaan. - Program Kesenian, Kebudayaan, dan Pengembangan Pariwisata dalam Program Desa Binaan. - Pelatihan UMKM dalam Program Desa Binaan. - Bantuan Untuk Masyarakat - Pengembangan Balkondes sebagai sarana penambah Pendapatan Asli Desa. - Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana publik.
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur 	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.	- Penyediaan Sarana dan Peralatan yang Mendukung Pertumbuhan Usaha Masyarakat. - Proposal Aspirasi Masyarakat
	Mengurangi Kesenjangan 	Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Desa Binaan.
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 	Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	- Sinergi dengan berbagai Pemangku Kepentingan dalam Program Desa Binaan. - Program Pengadaan Sarana Publik Untuk Mitra Rekanan PGN

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program TJSL
Lingkungan	Air Bersih dan Sanitasi 	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.	- Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. - Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum Dalam Program Desa Binaan.
	Keberlanjutan Kota dan Komunitas 	Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.	- Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. - Program Pemberdayaan Lingkungan. - Program Bank Sampah dalam Program Desa Binaan. - Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan. - Bantuan Untuk Masyarakat dan Proposal Aspirasi Masyarakat. - Bantuan Untuk Masyarakat yang Terkena Bencana Alam. - Bantuan Pengadaan Bak Sampah.
	Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab 	Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.	- Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. - Program Pariwisata Berkelanjutan dalam Program Desa Binaan. - Bantuan Untuk Masyarakat Terkait Lingkungan.
	Aksi Terhadap Iklim 	Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.	- Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. - Penanaman Mangrove dan Pohon. - Penyediaan alat untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
	Kehidupan Bawah Laut 	Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.	- Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. - Penanaman Mangrove
	Kehidupan di Darat 	Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.	- Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. - Bantuan Sarana Penanggulangan Kebakaran Hutan. - Penanaman Mangrove dan Pohon.
Hukum dan Tata Kelola	Institusi Peradilan yang Kuat dan Perdamaian 	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak termasuk untuk lembaga, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Sosialisasi dan Pelatihan Terkait Anti-Korupsi, Etika, dan Integritas. Program Penguatan Budaya Perusahaan.

PEMETAAN 6 PRIORITAS TPB

PGN telah melakukan pemetaan terhadap 6 Prioritas TPB yang diseleksi berdasarkan keterkaitan langsungnya dengan kegiatan Perusahaan sehingga perlu untuk dilakukan mitigasi risiko operasi untuk memitigasi atau meminimalisir dampak eksternalitas, serta memaksimalkan potensinya untuk menghadirkan manfaat yang luas, yaitu TPB sebagai berikut:

- (7) Energi Bersih dan Terjangkau
- (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- (13) Penanganan Perubahan Iklim
- (14) Ekosistem Lautan
- (15) Ekosistem Daratan

Pemetaan 6 Prioritas SDGs



Target yang terkait langsung kegiatan perusahaan dan sebagai mitigasi operasi.

Target yang menjadi peluang pengembangan potensi serta dapat mendukung operasi dan bisnis perusahaan.



PERISTIWA PENTING (TERKAIT TJSL)



Januari 2021

Penyerahan Bantuan Ambulance

PGN memberikan bantuan kesehatan berupa pengadaan 1 unit ambulance di Universitas Andalas Padang untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang merata di berbagai daerah.



Februari 2021

Bantuan Korban Bencana Banjir di wilayah Karawang, Rengasdengklok, Subang, dan Bekasi

PGN menyalurkan bantuan tunai dan sembako di daerah Karawang, Rengasdengklok, Subang dan Bekasi untuk membantu para korban bencana alam banjir.



Maret 2021

Bantuan Infrastruktur Publik di Pamekasan

PGN membantu pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah di wilayah Pamekasan. PGN memberikan bantuan dana yang akan digunakan untuk Pembangunan Plengsengan Kelompok Masyarakat, Pembangunan Pavingisasi, Penahan Tebing, serta Pembangunan saluran air.



April 2021

Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

PGN turut berkontribusi dalam tercapainya *herd immunity* di Indonesia melalui bantuan untuk pelatihan sosialisasi vaksin Covid-19 di Tasikmalaya. PGN berharap, sosialisasi vaksin COVID-19 akan membuat masyarakat menyadari pentingnya vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok yang akan mengurangi jumlah orang yang terpapar virus COVID-19.



Mei 2021

Employee Voluntary Program

PGN mempromosikan budaya peduli sosial kepada karyawan dengan mengajak karyawan berpartisipasi dalam acara sosial kemasyarakatan bertajuk *Employee Voluntary Program*.



Juni 2021

Bantuan Bingkisan Ramadhan

Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan, PGN memberikan bantuan sebanyak 10.000 paket bingkisan Ramadhan di 9 Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.



Juli – September 2021

Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

PGN turut membantu suksesi Protokol Kesehatan 5 M yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI dengan memberikan bantuan alat-alat dan perlengkapan untuk mencegah COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia.



Agustus 2021

Bantuan Bagi Kelompok Tani

PGN memberikan bantuan berupa pengadaan dan distribusi hewan qurban dalam rangka pelaksanaan Idul Adha 1442 H.



Oktober - November 2021

Bantuan Bagi Kelompok Tani

Dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, PGN memberikan Bantuan Pengadaan Mesin bagi kelompok Tani Luban Sianturi – Sumatera Utara. PGN berharap bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas kelompok tani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Desember 2021

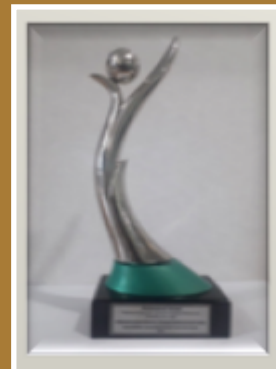
Pengembangan Balkondes, Magelang, Jawa Tengah

PGN membantu pengembangan Balkondes di Magelang, Jawa Tengah. Balkondes ditujukan untuk menumbuhkan peluang usaha pariwisata melalui pembuatan homestay yang akan memperpanjang waktu tinggal wisatawan dengan adanya pertunjukan budaya baru pada tiap desa serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa serta menciptakan lapangan kerja bagi penduduk desa.

Penyediaan Oksigen Generator di tiga (3) wilayah Lokasi SOR dan Tabung Oksigen

Komitmen PGN untuk menuju dunia lebih baik pasca Covid-19 dengan cara yang lebih selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui penyediaan Oksigen Generator di tiga (3) wilayah Lokasi SOR yakni Medan, Klender dan Surabaya serta 500 buah Tabung Oksigen yang didistribusikan pada rumah sakit kerjasama IHC PT Pertamina Bina Medika. Penegasan dukungan PGN sebagai prioritas penanganan dampak pandemi dan kebermanfaatan bagi Indonesia

PENGHARGAAN



01

Penghargaan Organizational Governance, Based on Overall Sustainability Performance: Infrastructure, Utilities and Transportation dan Project Based CSR & Business Sustainability: Strategi Sustainability dari CECT Sustainability Awards.

02

TOP CSR Awards dan TOP Leader on CSR Commitment 2021 oleh Majalah Top Business

03

ICONOMICS CSR Awards 2021, Inisiatif Tanggap Darurat Covid-19: Dukungan Kesehatan Medis

04

Platinum Award 2021 dari ASSRAT (Asia Sustainability Reporting Rating)

05

PROPER HIJAU 2020-2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia



BAB 4

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

“Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Untuk itu, UMK perlu dilindungi dari kegagalan risiko yang bersumber dari faktor eksternal serta persaingan bisnis yang tidak sehat. Melalui PUMK, PGN berharap UMK dapat tumbuh menjadi tangguh dan mandiri.”

SEKILAS TENTANG PUMK

Program Pendanaan UMK/PUMK (dahulu disebut Program Kemitraan) merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Usaha mikro dan kecil (UMK) perlu dilindungi dari kegagalan risiko dari faktor eksternal serta persaingan bisnis yang tidak sehat. Peran UMK bagi perekonomian nasional sangatlah besar, diantaranya memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto (46,88%) dan Penyerapan Tenaga Kerja (93,85%)¹. Setiap tahunnya, jumlah usaha kecil di Indonesia terus bertambah.

Tantangan bagi usaha kecil adalah sekitar 90% masih berada dalam level tradisional². Kontribusinya pada ekspor juga masih kecil (4%)³, terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Untuk itu, dibutuhkan upaya bersama untuk membina dan membantu UMK agar dapat memiliki modal dan kapasitas yang cukup untuk dapat tumbuh menjadi tangguh dan mandiri. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non-alam membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional, khususnya pada sektor UMK. Pembatasan sosial berskala besar termasuk pembatasan kegiatan ekonomi mengakibatkan 88% UMK kehabisan pembiayaan keuangan serta 60% UMK mengurangi tenaga kerjanya⁴. Untuk itu, PGN menyelenggarakan Program Pendanaan UMK untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi khususnya bagi sektor UMK akibat Pandemi COVID-19. Berikut adalah kinerja PUMK PGN pada tahun pelaporan.

PENGALIHAN PENGELOLAAN DANA

Pada tahun 2019, PGN mendukung program untuk mengefektifkan pengelolaan Portofolio Dana Kemitraan dari Kementerian BUMN dengan mengalihkan sebagian besar portofolio kelolaan kepada BUMN Khusus. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua Permen BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program PKBL.

BUMN Khusus merupakan BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus didirikan untuk pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat. Dalam hal ini, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah ditunjuk secara resmi sebagai BUMN Khusus berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.S.822/MBU/12/2018. PT PNM sendiri didirikan pada 1 Juni 1999 dan berfokus pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Sejak tahun 2019, PGN telah merealisasikan pengalihan portofolio mitra penyalur BUMN dalam bentuk hibah kepada PT PNM sebesar Rp177,97 miliar. Walaupun dana telah dikelola oleh PT PNM, PGN tetap melakukan monitoring realisasi penagihan *outstanding* portofolio dana Program Kemitraan oleh PT PNM.

Namun demikian, tidak seluruh dana pengelolaan Program Kemitraan dialihkan kepada BUMN Khusus. Sisa portofolio Program Kemitraan dari skema penyaluran langsung tetap dikelola oleh PGN. Pada tahun pelaporan, PGN berfokus dalam melakukan usaha pemulihan kualitas pinjaman, khususnya pinjaman dengan status diragukan dan macet.

Portofolio	Jumlah	Status
Mitra Penyalur BUMN	Rp177,97 miliar	Dialihkan ke PT PNM dalam bentuk hibah.
Skema Penyaluran Langsung Kepada Individu dan Sinergi BUMN	Rp12,3 miliar (Kas) Rp54 miliar (Piutang Bermasalah Mitra Binaan) Rp7,24 miliar (Piutang BUMN Penyalur) Rp110,7 miliar (Piutang bermasalah BUMN Penyalur)	Dikelola mandiri oleh PGN

¹Data Kementerian Koperasi dan UMKM, dialah.
²<https://www.idxchannel.com/economics/jadi-penyelamat-ekonomi-umkm-perlu-dilindungi>
³Data Kementerian Koperasi dan UMKM, dialah
⁴<https://www.jawapos.com/nasional/04/08/2021/terimbas-pandemi-32-juta-umkm-gulung-tikar/>

PERALIHAN PROGRAM KEMITRAAN MENJADI PROGRAM PENDANAAN UMK

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara mengubah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN yang mencakup Program Pendanaan UMK (PUMK) maupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan ketentuan peralihan program, penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan yang sudah dilaksanakan dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri (20 April 2021) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan tersebut.

Dana Tersedia Untuk Program Pendanaan UMK (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	2021		%
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
Saldo awal	12.071.789.926	12.000.486.179	99,41%
Penyisihan laba dari BUMN Pembina	-	-	-
Pengembalian pinjaman dari mitra binaan	120.000.000	78.445.660	65,37%
Pengembalian dana dari BUMN Pembina lain/ Lembaga penyalur	1.200.000.000	36.0000.000	3,00%
Pendapatan jasa giro	-	230.882.577	-
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	200.000.000	184.706.061	92,35%
Pendapatan lain	-	13.905.000	-
Penerimaan lain	-	-	-
Dana tersedia	13.591.789.926	12.313.542.900	90,60%

Dana yang tersedia untuk Program Pendanaan UMK di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp12.313.542.900 (143,32%) dari rencana. Angka tersebut berasal dari realisasi saldo awal, pengembalian pokok pinjaman dari mitra binaan dan BUMN penyalur, serta pendapatan jasa giro dan pendapatan jasa administrasi pinjaman. Pengembalian pokok pinjaman dari mitra binaan dan BUMN penyalur masing-masing sebesar Rp78.445.660, (65,37%) dan Rp36.000.000 (3,00%) dari rencana. Adapun Kami telah berupaya maksimal dalam menjalankan pemulihan kualitas piutang melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*)

dan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Pada tahun pelaporan, Kami memperoleh pendapatan jasa giro dan pendapatan jasa administrasi pinjaman masing-masing sebesar Rp 230.882.577 dan Rp 184.706.061 (92,35%) dari rencana. Pendapatan jasa giro diperoleh dari bank tempat penempatan giro. Sementara pendapatan jasa administrasi pinjaman didapatkan dari pembayaran yang dibayarkan oleh mitra binaan atau lembaga penyalur.

Penyaluran Dana Program Pendanaan UMK

Uraian	2021		%
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra Binaan	-	-	-
Penyaluran Pinjaman Kepada BUMN Khusus	5.000.000.000	-	-
Penyaluran Dana Pembinaan	-	-	0,00%
Jumlah	5.000.000.000	-	0,00%

Sejak tahun 2016, mengacu kepada kebijakan perusahaan melalui Nota Dinas Nomor 024400. ND/HM.05/FIN/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal Kebijakan terkait pelaksanaan PKBL, PGN tidak lagi menyalurkan dana pinjaman kepada mitra binaan. PGN juga tidak lagi melakukan penyisihan dana dari laba tahun sebelumnya. PGN berfokus pada upaya penagihan pengembalian pokok pinjaman. Pada tahun pelaporan, kami telah merencanakan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro kecil melalui sinergi BUMN atau entitas lainnya. Namun demikian, Kami menilai situasi dan kondisi pandemi selama Tahun 2021 belum kondusif untuk mendukung penyaluran dana tersebut. Pada Bulan Juni-Juli, Indonesia kembali dilanda gelombang kedua lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta. Sehingga, Pemerintah kembali menerapkan PPKM darurat serta PPKM berbasis level. Hal ini turut membatasi ruang gerak kami dalam melakukan penyaluran dana kepada BUMN Khusus maupun dalam melakukan kegiatan Pembinaan kepada para mitra binaan. Sehingga, pada tahun pelaporan Kami fokus pada persiapan rencana penyaluran tahun

anggaran berikutnya serta melakukan penyempurnaan terhadap prosedur manual TJSL yang mengakomodir PER-05/MBU/04/2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Kami optimis pada Tahun berikutnya, Kami akan mampu menyalurkan dana PUMK secara efektif melihat kondisi pandemi COVID-19 yang semakin menunjukkan perbaikan.

KOLEKTIBILITAS PINJAMAN

Kualitas pinjaman Program Pendanaan UMK dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman usaha mikro dan usaha kecil binaan. Penggolongan kualitas pinjaman modal kerja ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar: Jika angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dibayarkan tepat waktu atau terjadi keterlambatan paling lambat 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Kurang lancar: Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi

pinjaman yang telah lebih dari 30 hari - 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

- Diragukan: Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah lebih dari 180 hari - 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Macet: Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah lebih dari 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

Tingkat kolektibilitas pinjaman mencerminkan tinggi atau rendahnya besaran pinjaman yang dilunasi oleh mitra binaan. Semakin tinggi tingkat kolektibilitas, maka semakin lancar pengembalian pinjaman yang dilunasi. Sebaliknya, tingkat kolektibilitas yang rendah menggambarkan pengembalian pinjaman yang macet.

Berikut adalah kolektibilitas pinjaman PUMK PGN selama Tahun 2017-2021:

Penyaluran Dana Program Pendanaan UMK

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Piutang	7.245.215.650	13.137.253.625	14.839.580.409	16.746.284.008	20.104.624.055
Kategori Lancar	-	-	1.835.646.451	3.472.221.455	5.365.259.293
Kategori Kurang Lancar	-	-	-	-	57.202.000
Kategori Diragukan	-	-	-	35.500.000	8.761.874.650
Kategori Macet	7.245.215.650	13.137.253.625	13.003.933.958	13.238.562.553	5.920.288.112
Rasio Kolektibilitas	0	0	12,36	19,45	55,56
Skor	0	0	0	1	2

Jumlah pinjaman PUMK per tahun pelaporan adalah Rp7.245.215.650, yang keseluruhannya terdiri dari Piutang Macet.

Pada tahun pelaporan, PGN tetap berfokus pada pemulihan kualitas pinjaman. Namun demikian, mengingat situasi kondisi pandemi yang berdampak signifikan pada kondisi finansial mitra binaan, Kami menjalankan beberapa kebijakan sesuai arahan Kementerian BUMN, dimana Kami menerapkan Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pendanaan UMK serta Kebijakan Penundaan Pembayaran Kewajiban Angsuran Pinjaman Pendanaan UMK. Hal ini Kami lakukan untuk mengurangi beban para mitra binaan serta membantu dalam pemulihan kondisi finansial UMK akibat pandemi COVID-19.

PEMULIHAN PINJAMAN

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria berikut:

- Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya pemulihan yang akan dilakukan;
- Mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; dan
- Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Pinjaman Bermasalah Mitra Binaan

Pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya melalui penjadwalan

ulang dan rekondisi, namun tidak terpulihkan. Kriteria pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengembalian piutang yang substansial meskipun telah dilakukan upaya pemulihan pinjaman dan konfirmasi piutang selama 3 tahun; dan/atau

2. Pinjaman telah berusia lebih dari 10 tahun.

Per 31 Desember 2021, saldo piutang bermasalah mitra binaan sejumlah Rp54.025.588.636 dan seluruhnya telah dicadangkan.

Analisis saldo pinjaman bermasalah mitra binaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

Sektor	Tahun 2021	Tahun 2020
Perdagangan	16.837.075.299	16.839.075.299
Jasa	13.765.950.330	13.773.250.330
Industri	13.739.397.591	13.795.543.251
Peternakan	5.275.673.013	5.288.673.013
Pertanian	1.919.055.043	1.919.055.043
Perikanan	903.361.334	903.361.334
Perkebunan	215.436.416	215.436.416
Lainnya	1.369.639.610	1.369.639.610
Jumlah Pinjaman Bermasalah Mitra Binaan	54.025.588.636	54.104.034.296
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(54.025.588.636)	(54.104.034.296)
Pinjaman Bermasalah Mitra Binaan, Bersih (Net)	-	-

Pinjaman Bermasalah BUMN Penyalur

Pada tahun 2012, PGN memberikan pinjaman kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 Pertani dinyatakan bubar dan melebur dengan PT Sang Hyang Seri.

Berikut adalah total pinjaman BUMN Penyalur per 31 Desember 2021:

 Rp73.715.000.000 PT Sang Hyang Seri (Persero)	 Rp36.987.000.000 PT Pertani (Persero)
--	---

Strategi Pengelolaan Pinjaman Bermasalah

Kami berfokus kepada penagihan pinjaman bermasalah mitra binaan maupun sinergi BUMN melalui berbagai upaya berikut:

- Pemberian kode *virtual account* kepada Mitra Binaan.
- Pengawasan pembayaran angsuran melalui fasilitas *cash management system* (CMS) dari bank yang bisa dilihat secara *online*.
- Melakukan konfirmasi melalui telepon.
- Melakukan kunjungan langsung ke Mitra Binaan.
- Melakukan konfirmasi dan penagihan piutang secara periodik.

- Melakukan penjadwalan ulang cicilan *outstanding* pinjaman.
- Melakukan rapat secara rutin dengan Kementerian BUMN.

FOKUS KE DEPAN

Pada tahun yang akan datang, PGN akan memulai kembali penyaluran pinjaman melalui skema pemberian langsung, baik kepada mitra binaan maupun melalui sinergi BUMN. Tentunya, dengan tetap berfokus untuk mengurai pinjaman bermasalah melalui berbagai upaya dan strategi yang telah disebutkan diatas.





BAB 5

PILAR EKONOMI

“PGN mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.”

SEKILAS PILAR EKONOMI



PGN berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya serta mencapai kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik melalui berbagai upaya penyelenggaraan program-program TJSL pada pilar ekonomi.

Adapun program-program TJSL pada Pilar Ekonomi difokuskan untuk berkontribusi terhadap pencapaian TPB, khususnya:

- TPB No. 7 - Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.
- TPB No. 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.
- TPB No. 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- TPB No. 10 - Berkurangnya Kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.

- TPB No. 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

TPB PADA PILAR EKONOMI

PGN telah menyusun 6 prioritas TPB yang menjadi peluang pengembangan potensi serta dapat mendukung operasi dan bisnis Perusahaan. Prioritas yang terkait dengan Pilar Ekonomi adalah pencapaian TPB No. 7 Energi Bersih dan Terjangkau serta pencapaian TPB No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Energi Bersih dan Terjangkau

Pencapaian TPB No.7 Energi Bersih dan Terjangkau terkait langsung dengan operasi bisnis Perusahaan, dimana bisnis utama PGN bergerak salah satunya dalam segmen usaha niaga dan transmisi gas bumi. Gas bumi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan bahan bakar fosil lainnya, yaitu intensitas karbonnya yang rendah. Oleh karena itu, gas bumi memiliki peran yang sangat penting dalam transisi energi fosil menuju energi terbarukan. Pada *Conference of the Parties (COP) ke-26* yang dilaksanakan di Glasgow pada 31 Oktober hingga 12 November 2021, diperoleh kesepakatan terkait target ambisius untuk aspek emisi, di mana seluruh negara

di dunia diharapkan berkontribusi untuk mencapai *net zero emission* (NZE) pada 2050-2060. Indonesia ikut menandatangani kesepakatan terkait transisi energi dimana penggunaan batu bara untuk energi listrik akan dihentikan pada tahun 2040. Pemerintah Indonesia juga menargetkan penggunaan energi terbarukan yang akan menjadi dominan pada tahun 2050.

Transisi energi semakin menguatkan peran PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah

mengamanatkan PGN untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui Program Gasifikasi Gas Bumi. Melalui Kepmen ESDM No 91.K/2020, PGN ditunjuk untuk mendukung konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan *Liquid Natural Gas* (LNG) atau gasifikasi untuk operasional di 52 pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk itu, PGN menargetkan peningkatan pengelolaan niaga gas, penguatan pasokan gas, serta perluasan infrastruktur gas bumi.

92%

PGN menguasai 92% pangsa pasar niaga gas bumi melalui pipa distribusi di Indonesia.

96%

PGN mengelola 96% infrastruktur hilir gas bumi yang sudah terbangun dan beroperasi.

7.600 km

PGN mengelola sekitar 7.600 km panjang pipa jaringan gas.

6.811,90 km

PGN mengelola sekitar 6.811,90 km jaringan pipa distribusi dan transmisi.

4.017,60 km

PGN mengelola sekitar 4.017,60 km jaringan pipa subsidiaries (TGI, PLI, KJG, NR, dan Pertagas).

Komitmen PGN untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi guna merealisasikan kemandirian energi nasional dan menyediakan akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang diwujudkan secara bertahap pada Tahun 2020-2026 melalui Program Strategis Subholding Gas yaitu Tujuh Program Gasifikasi Nasional atau "Sapta PGN+" yang terdiri dari:

1. PGN Sayang Ibu: Layanan gas bumi terintegrasi dengan tambahan layanan produk untuk mempermudah kehidupan masyarakat modern melalui program pengembangan jaringan Gas untuk Pelanggan Rumah Tangga.
2. PGN Mendukung industri Khusus: Layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk 7 sektor industri khusus sesuai dengan Kepmen ESDM 89K/2020 serta dukungan penyediaan gas untuk *new captive market*.
3. PGN untuk Listrik Nasional: Layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk sektor kelistrikan sesuai dengan RUPTL, Kepmen ESDM 91K/ 2020 dan Kepmen ESDM 13/2020.
4. PGN Retail dan Industri Umum: Layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk sektor industri

umum melalui pipa dan non pipa serta dukungan pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui pipa transmisi dan pipa distribusi.

5. PGN Sektor Maritim: Layanan gas bumi melalui program Konversi transportasi sektor laut menjadi berbahan bakar LNG.
6. PGN Sektor Darat: Layanan gas bumi melalui program konversi transportasi sektor darat berbahan bakar gas.
7. PGN Masuk Desa: Layanan gas bumi melalui penyediaan Energi Alternatif untuk masyarakat yang berlokasi di luar jangkauan infrastruktur pipa dan non-pipa PGN (Pemberdayaan sumber daya lokal).
8. Going Global: Pengembangan bisnis PGN dalam bidang *trading* gas dan infrastruktur *backbone* gas di Asia.

Untuk mendukung pelaksanaan Program Sapta PGN, Kami meningkatkan pengelolaan infrastruktur gas bumi secara terintegrasi dalam proses bisnis hilir gas bumi mulai dari pengadaan pasokan gas bumi dari berbagai sumber hingga transmisi/transportasi.

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian TPB No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi juga terkait langsung dengan operasi Perusahaan. Eksistensi PGN telah menyerap tenaga kerja dan membuka mata pencaharian baik secara langsung maupun tidak langsung di sepanjang rantai nilai Perusahaan, termasuk rantai pasok dan distribusi.

Jumlah karyawan PGN Group pada tahun pelaporan berjumlah 2.498 orang yang terdiri dari pekerja tetap dan temporer. Kami memprioritaskan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal untuk seluruh level jabatan dan 100% manajemen senior PGN berasal dari Indonesia.

Selain karyawan tetap dan temporer PGN, eksistensi PGN juga turut memberi kontribusi ekonomi kepada pemasok, baik pemasok barang, kontraktor, konsultan, maupun pemasok jasa lainnya. PGN mengedepankan pemilihan pemasok lokal yang berasal dari Indonesia. Pada Tahun pelaporan, anggaran yang dibayarkan kepada pemasok lokal mencapai 99,9%.

ANGGARAN DANA DAN REALISASI PILAR EKONOMI TAHUN 2021

No	TPB	RKA Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Presentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
A	PILAR EKONOMI			
1	TPB 7	448.457.775	448.457.775	100%
2	TPB 8	8.444.174.373	7.386.690.594	87%
3	TPB 9	5.400.000.000	5.170.088.264	96%
4	TPB 10	150.000.000	-	-
5	TPB 17	180.000.000	180.000.000	100
	TOTAL	14.622.632.148	13.185.236.633	90%

Sepanjang periode pelaporan, PGN telah menyalurkan realisasi biaya sebesar Rp13.185.236.633, (90%) dalam pilar ekonomi.

PROGRAM-PROGRAM TAHUN 2021

PGN melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dirancang telah disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Impelementasi program TJSI mengacu pada ISO 26000. Kami juga berorientasi pada *Creating Share Value* (CSV) untuk memaksimalkan penciptaan nilai bersama agar memberikan manfaat luas kepada seluruh pemangku kepentingan.



Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program TJSL
Ekonomi	Energi Bersih dan Terjangkau 	Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.	• Peluang Pengembangan Potensi Pendukung Operasi Perusahaan. • Bantuan pembangunan Sambungan Rumah, Konstruksi SR, Pengadaan Kompor di Balkondes Karangrejo
	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak 	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.	• Peluang Pengembangan Potensi Pendukung Operasi Perusahaan. • Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Desa Binaan. • Program Kesenian, Kebudayaan, dan Pengembangan Pariwisata dalam Program Desa Binaan. • Pelatihan UMKM dalam Program Desa Binaan. • Bantuan Untuk Masyarakat • Pengembangan Balkondes sebagai sarana penambah Pendapatan Asli Desa. • Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana publik.
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur 	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.	• Penyediaan Sarana dan Peralatan yang Mendukung Pertumbuhan Usaha Masyarakat. • Proposal Aspirasi Masyarakat
	Mengurangi Kesenjangan 	Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Desa Binaan.
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 	Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	• Sinergi dengan berbagai Pemangku Kepentingan dalam Program Desa Binaan. • Program Pengadaan Sarana Publik Untuk Mitra Rekanan PGN

Penyediaan Sarana dan Peralatan yang Mendukung Pertumbuhan Usaha Masyarakat

PGN memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pengadaan sarana dan peralatan yang dapat menunjang produktivitas sehingga penerima manfaat memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Bentuk penyaluran sarana dan peralatan terdiri dari:

- Penyediaan 3 mesin panen padi (Combine) DC-35 di Jawa Timur
- Alat Penyulingan Sereh di Cilacap
- Bantuan untuk kegiatan budidaya perikanan di Labuhan Batu
- Pengadaan Mesin Ultivator Yanmar Te 550n di Humbang Hasundutan
- Bantuan Pembuatan Kandang Ternak Lembu di Labuhanbatu
- Peralatan Pertanian Motor Roda Tiga Vitar (*Handsprayer*) Elektronik
- Bantuan pengembangan Balkondes Karangrejo Magelang

Desa Binaan

PGN bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan merealisasikan program Desa Binaan di 5 desa yang berlokasi di ring 1 wilayah operasional PGN. Program ini ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi rakyat melalui penguatan institusi lembaga kemasyarakatan dan optimalisasi potensi desa. Diharapkan, Desa Binaan dapat menjadi desa yang maju dan mandiri, sehingga mampu menunjang pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun program-program yang dirancang dan diimplementasikan dalam Desa Binaan disesuaikan dengan potensi dari masing-masing desa.

Melalui Program Desa Binaan, PGN menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan warga lokal. Diharapkan, terdapat nilai bersama yang dapat diciptakan dari kegiatan ini, di mana warga desa menjadi lebih sejahtera dan juga mendukung operasi PGN. Di wilayah Desa Binaan terdapat *offstake station* (stasiun gas PGN) yang merupakan objek vital nasional yang berperan penting dalam jaminan ketersediaan pasokan gas di wilayah yang dilayani. Untuk itu, dukungan warga sangatlah penting bagi kelancaran aktivitas operasi Perusahaan.

Terdapat 5 Desa Binaan yang dikelola oleh PGN, yaitu:

1. Station Gas Pagardewa: Desa Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan
2. Station Gas Kalisogo: Desa Tambak Kalisogo, Sidoarjo, Jawa Timur (SOR III)
3. Station Gas Panaran: Desa Tembesi Tower, Pulau Lance, Batam
4. Station Gas Bojonegara: Desa Teluk Terate, Kec. Kramawatu Labuhan, Kab. Serang
5. Station Gas Maringgai: Desa Sriminosari, Kec. Labuhan Maringgai, Lampung

Program Desa Binaan sendiri direncanakan dengan komprehensif dan melalui berbagai tahapan berikut:

1. Pemetaan pemangku kepentingan
2. Pemetaan sosial
3. Survei ke pemangku kepentingan PGN di sekitar lokasi
4. Perencanaan program
5. Implementasi program
6. Monitoring dan evaluasi program
7. Penyerahan program kepada kelompok masyarakat (*exit strategy*).



Pemetaan Pemangku Kepentingan



Perencanaan Program

Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses pembuatan program-program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan potensi desa. Program-program yang dikembangkan antara lain:

- Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat seperti penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES dan pembentukan UKM untuk ibu-ibu.
- Program Kesehatan seperti pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan bantuan peralatan di posyandu.
- Program Pemberdayaan Lingkungan seperti perlombaan dusun bersih dan sehat dan peningkatan manajemen kelompok bank sampah.
- Program Kesenian dan Kebudayaan seperti tentang pertunjukan seni tahunan.
- Program Infrastruktur seperti renovasi sarana belajar dan pembuatan sarana air bersih.

Station Panaran, Pulau Lance, Batam

- Tanaman Obat
- Koperasi
- UMKM
- Bank Sampah
- Posyandu Balita
- Posyandu Lansia
- CBT (*Community Based Tourism*) Pulau Lance

Station Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan

- BUMDES
- Air Isi Ulang
- UMKM
- Bank Sampah
- Pasar
- Penyewaan Mesin Parut
- Rental Tenda

Station Bojonegara, Teluk Terate, Serang

- BUMDES
- Air Isi Ulang
- UMKM
- *Microfinance*
- Pariwisata

Station Labuan Maringgai, Lampung

- BUMDES
- Perdagangan
- Penyewaan
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- Pariwisata

Station Kalisogo, Desa Tambak Kalisogo, Sidoarjo, Jawa Timur:

- BUMDES
- Pengelolaan sampah untuk dibuat Maggot (Pakan ikan)
- Pembuatan Kampung PGN/Resto PGN
- Catering untuk kawasan industri Sidoarjo di Kalisogo

Implementasi Program

Di tahun 2021, Kami berfokus pada implementasi program di Desa Pagardewa dikarenakan beberapa tantangan yang dihadapi. *Offtake station* Pagardewa berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan. Program ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat desa; serta menyediakan akses atau permodalan melalui koperasi dan Unit BUMDES untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa.

	Bank sampah saat ini memiliki 230 nasabah dengan jumlah tabungan sebesar Rp38.557.000. Hal ini meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar dan meminimalisir limbah padat non B3 di <i>Station</i> Pagardewa.
	Koperasi karet telah memiliki anggota sebanyak 37 petani yang sudah melakukan MoU Bersama PT Kirana Permata.
	Pengelolaan air bersih dan air minum saat ini memiliki 57 pelanggan tetap dengan jumlah tabungan sebesar Rp11.954.000.
	Koperasi simpan pinjam saat ini memiliki 31 anggota dengan jumlah saldo koperasi berjumlah Rp47.810.000.
	Penerima Manfaat 3.655 jiwa

Monitoring dan Evaluasi Program

Indeks Kepuasan Masyarakat

PGN melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di *Station* Pagardewa untuk menilai kepuasan masyarakat serta meninjau kesesuaian implementasi program dengan perencanaan program. Kami juga ingin mengukur dampak yang dihasilkan dari implementasi Program Desa Binaan. Di tahun 2021 tingkat kepuasan masyarakat mencapai 91,35 dengan nilai mutu pelayanan kategori A dengan predikat Sangat Puas.

Indikator Kemandirian Program

Kami juga mengukur kemandirian program untuk meninjau tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pembinaan yang kami lakukan. Beberapa program telah berlangsung mandiri dan tidak membutuhkan pendampingan lebih lanjut, namun beberapa program masih dalam tahap awal sehingga membutuhkan pendampingan dan pembinaan lebih lanjut.

Program CSR Desa Binaan yang diselenggarakan oleh PGN, pada tahun 2021 berhasil mendapatkan penghargaan "Top CSR Award 2021 Bintang 4" dan "Top Leader on CSR Commitment 2021" yang diberikan oleh majalah Top Business bekerjasama dengan sejumlah institusi.

Balkondes

Balkondes merupakan sebuah program bentukan BUMN yang memberikan ruang bagi pemerintah desa maupun masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Program Balkondes dilaksanakan dalam rangka mendukung program Pemerintah di sektor pariwisata khususnya terkait pengembangan dan pembangunan 10 Kawasan Strategis Nasional Pariwisata. Sejak tahun 2016, PGN berkontribusi dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pariwisata di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Untuk meningkatkan daya tarik serta memperpanjang waktu kunjungan wisatawan, terutama di masa pandemi seperti saat ini, PGN memberikan dukungan melalui mekanisme kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan sarana dan fasilitas pendukung pariwisata, antara lain:

1. *Homestay*/penginapan (sejak Tahun 2016)
2. Restoran dengan sajian masakan tradisional (sejak Tahun 2016)
3. Program jaringan gas
4. Café
5. Ruang Pertemuan
6. Plaza
7. *Entrance gate*

Seluruh sarana dan fasilitas pendukung tersebut dikelola oleh PGNMAS (salah satu Anak Perusahaan PGN) bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat Karangrejo sebagai tenaga kerja. Hal ini tentu menambah kemandirian ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fasilitas pendukung ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Fasilitas pendukung dibangun dengan mengusung tema modern dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan wisatawan. Café dan ruang pertemuan diharapkan dapat mendukung bisnis restoran yang telah ada. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk *venue meeting* dan *corporate event* bagi PGN dan Pertamina group, institusi pemerintah maupun swasta di sekitar BALKONDES. Plaza akan menjadi wadah untuk pagelaran seni budaya lokal, yang juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, plaza juga dapat digunakan sebagai *venue wedding*, *corporate event*, pagelaran musik, serta wadah bagi komunitas hobi dan olahraga.

Kami juga memfasilitasi UMKM di Desa Karangrejo untuk memasarkan produknya di area *Entrance Gate*, sehingga produk tersebut dapat langsung diketahui pengunjung yang datang. Kedepan, Kami akan terus mengupayakan agar balkondes dapat berfungsi sebagai etalase perekonomian daerah dan produk- produk PGN Group guna memajukan ekonomi lokal.



BAB 6

PILAR

LINGKUNGAN

“PGN berkomitmen untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian alam demi terjaganya seluruh kehidupan di bumi, termasuk kehidupan manusia. PGN mengupayakan operasi bisnis yang ramah lingkungan melalui mitigasi risiko lingkungan serta upaya-upaya pengelolaan lingkungan untuk menjaga ekosistem darat maupun laut, khususnya di wilayah dimana Perusahaan beroperasi.”

SEKILAS PILAR LINGKUNGAN

Pilar Lingkungan



Alam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di bumi, yakni sebagai penyangga kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan, alam juga menyediakan daya dukung. Oleh karena itu, agar pemenuhan kebutuhan dapat terus berjalan dari satu generasi ke generasi lainnya, pembangunan harus selaras dengan pelestarian alam. PGN berkomitmen untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang merupakan salah satu fokus utama dari pembangunan berkelanjutan.

Adapun program-program TJSL pada Pilar Lingkungan difokuskan untuk berkontribusi terhadap pencapaian TPB, khususnya:

- TPB No. 6 - Air Bersih dan Sanitasi
Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- TPB No. 11 - Keberlanjutan Kota dan Komunitas
Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.
- TPB No. 12 - Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- TPB No. 13 - Aksi Terhadap Iklim
Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- TPB No. 14 - Kehidupan di Bawah Laut
Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.

- TPB No.15 - Kehidupan di Darat
Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

PRIORITAS TPB PADA PILAR LINGKUNGAN

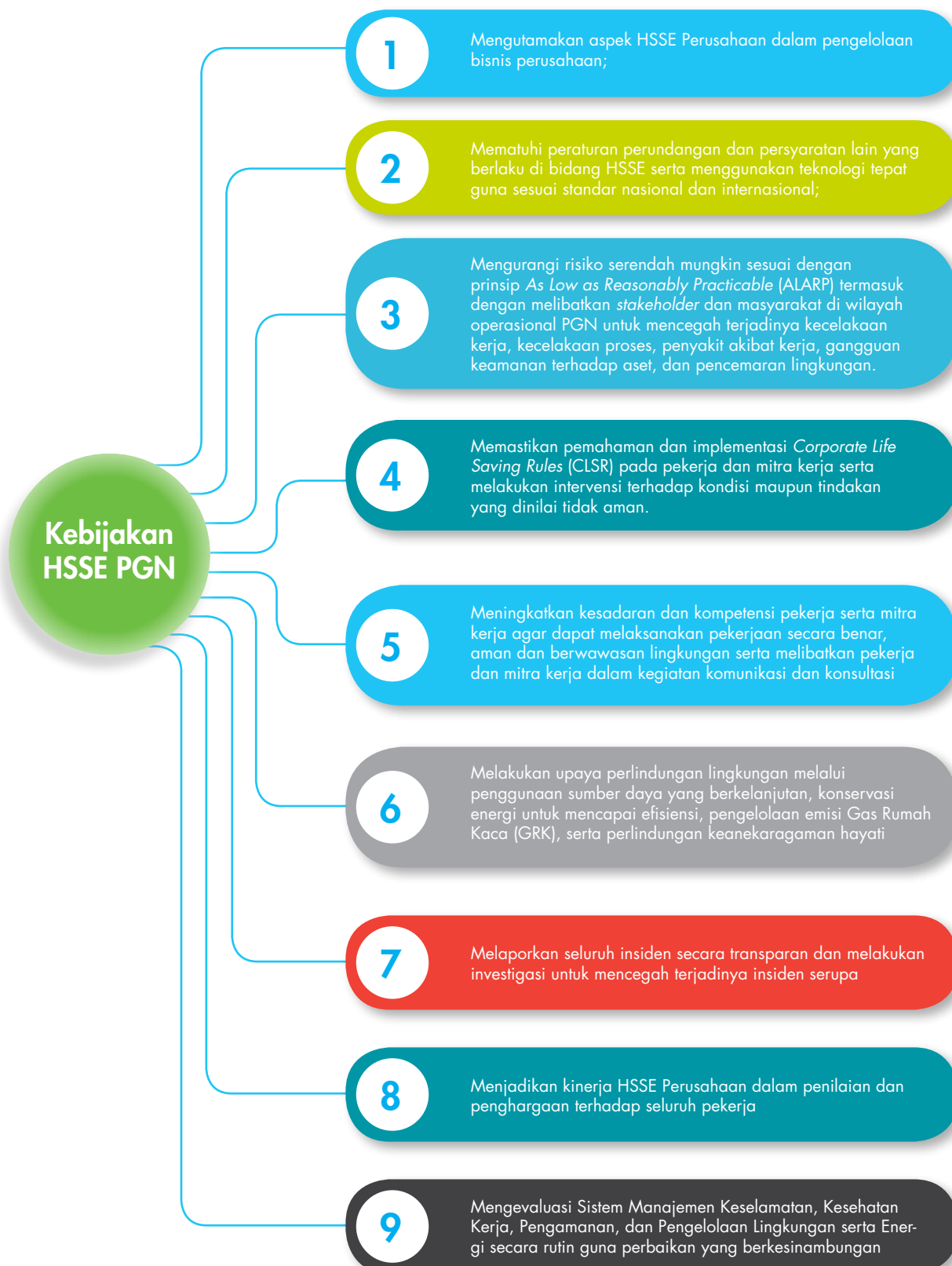
PGN telah menyusun 6 prioritas TPB yang menjadi fokus utama Perusahaan. TPB pada Pilar Lingkungan terkait dengan mitigasi risiko operasi yang terkait langsung dengan operasi bisnis Perusahaan serta memiliki potensi dampak lingkungan. Terdapat 4 TPB yang menjadi fokus pada Pilar Lingkungan, yaitu:

- TPB No. 12 - Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
- TPB No. 13 - Aksi Terhadap Iklim
- TPB No. 14 - Kehidupan di Bawah Laut
- TPB No.15 - Kehidupan di Darat

Aktivitas operasi Perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan. Untuk itu, PGN melakukan pengelolaan dampak lingkungan agar dampak tersebut dapat dimitigasi atau diminimalisir sehingga

tidak berbahaya bagi lingkungan maupun masyarakat. PGN mengedepankan proses produksi yang bertanggung jawab dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku serta standar dan sertifikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Komitmen PGN dalam mengedepankan proses produksi yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan tertuang dalam Kebijakan *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE) Perusahaan.



PGN juga menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan standar ISO 14001:2015 yang telah disertifikasi sejak Tahun 2016. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ditujukan untuk memberikan dukungan dalam perlindungan dan pencegahan pencemaran lingkungan terkait aktivitas operasi yang dilakukan Perusahaan.

Sistem Manajemen Lingkungan PGN Berdasarkan ISO 14001:2015

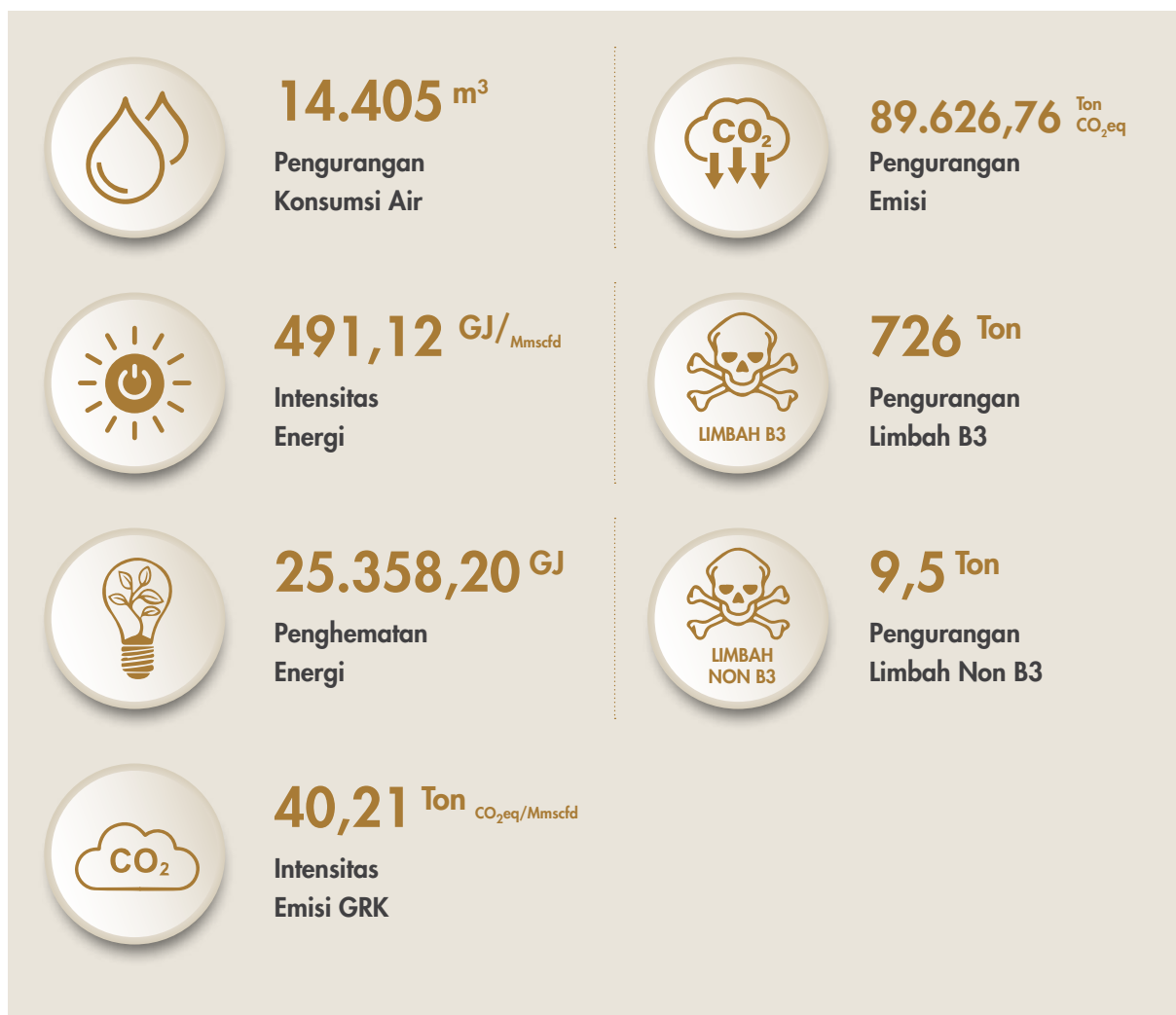


Secara berkala, kami melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai kinerja pada aspek lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dampak lingkungan sudah dikelola dengan baik. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan hasil identifikasi aspek dan dampak lingkungan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta program dan target kerja pada tahun pelaporan.

Hasil pengelolaan dan pemantauan dilaporkan kepada instansi pemerintah setempat di setiap semester. Kami juga melakukan pengungkapan kinerja lingkungan kepada masyarakat melalui *Sustainability Report* yang diterbitkan setiap tahun.

Pada tahun pelaporan, kami memperoleh PROPER Biru untuk 4 Lokasi yang artinya patuh terhadap peraturan perundangan terkait Lingkungan dan PROPER Hijau untuk 1 Lokasi yang artinya berinisiatif lebih dari yang diatur peraturan perundangan terkait Lingkungan (*Beyond Compliance*). PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Untuk mengelola dampak lingkungan akibat aktivitas operasi, Kami melakukan berbagai upaya seperti efisiensi penggunaan air dan energi, pengurangan emisi, pengurangan dan manajemen limbah, efisiensi penggunaan kertas, pemanfaatan energi terbarukan, serta berbagai program TJSI terkait Lingkungan.



ANGGARAN DAN REALISASI PILAR LINGKUNGAN TAHUN 2021

No	TPB	RKA Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Presentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
C	PILAR LINGKUNGAN			
1	TPB 6	-	-	-
2	TPB 11	2.056.206.634	2.013.841.500	98%
3	TPB 12	276.819.400	516.952.535	187%
4	TPB 13	100.000.000	100.000.000	100%
5	TPB 14	150.000.000	150.000.000	100%
6	TPB 15	50.000.000	50.000.000	100%
	TOTAL	2.633.026.034	2.830.794.035	108%

Sepanjang periode pelaporan, PGN telah menyalurkan realisasi biaya sebesar Rp2.830.794.035 (108%) dalam pilar Lingkungan.

PROGRAM-PROGRAM TAHUN 2021

PGN melakukan berbagai upaya dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan yang diharapkan dapat memitigasi dan meminimalisir dampak eksternalitas serta meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan maupun masyarakat yang terdampak. Program-program yang dirancang telah disesuaikan dengan prioritas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh PGN Group.

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program TJSL
Lingkungan	(6) Air Bersih dan Sanitasi 	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.	Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum Dalam Program Desa Binaan.
	(11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas 	Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.	Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. Program Pemberdayaan Lingkungan. Program Bank Sampah dalam Program Desa Binaan.
	(12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab 	Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.	Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. Program Pariwisata Berkelanjutan dalam Program Desa Binaan.
	(13) Aksi Terhadap Iklim 	Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.	Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. Penanaman Mangrove dan Pohon.
	(14) Kehidupan Bawah Laut 	Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.	Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan.

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program TJSL
	(15) Kehidupan di Darat 	Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.	Mitigasi Risiko Operasi Perusahaan. Bantuan Sarana Penanggulangan Kebakaran Hutan. Penanaman Mangrove dan Pohon.

*Program Desa Binaan disajikan secara lengkap pada Bab Pilar Ekonomi.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati memberikan gambaran kekayaan berbagai bentuk kehidupan yang ada di bumi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah teritorial yang luas, memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. PGN berusaha menjaga keanekaragaman berbagai flora, fauna, serta ekosistem di Indonesia, khususnya di sekitar wilayah operasi, untuk menjaga kelestarian lingkungan, memitigasi efek gas rumah kaca, serta menjaga kestabilan iklim.

Pada tahun pelaporan, PGN melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati berupa penanaman 2.000 mangrove di Desa Binaan PGN di Panaran Batam serta penanaman 1.000 pohon di Tangerang dan penanaman 125 pohon di Depok. Mangrove dan pohon memiliki manfaat sebagai penghasil oksigen dan penyerap gas karbondioksida. Mangrove juga dapat digunakan sebagai pencegahan abrasi. Diharapkan,

penanaman tanaman ini dapat berkontribusi terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar wilayah operasi Perusahaan.

Kami juga memberikan bantuan sarana dan prasarana umum terkait lingkungan, seperti penerangan jalan, pembangunan tembok penahan tanah, dan penyediaan kontainer sampah untuk walikota Medan.

PGN juga berfokus pada pencegahan kebakaran hutan. Kebakaran hutan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap keanekaragaman hayati, menghasilkan asap yang merusak kesehatan, serta menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Dari aspek ekonomi, kebakaran hutan juga menyebabkan kerugian ekonomi dalam jumlah yang besar mengingat fungsi daya dukung hutan bagi pembangunan. Untuk itu, pada tahun pelaporan PGN melakukan pengadaan pompa *portable hydrant* dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Dumai.



BAB 7

PILAR

SOSIAL

“PGN berfokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam seluruh aspek, termasuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Bagi PGN, peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan hal mendasar bagi pembangunan berkelanjutan.”

Pilar Sosial



SEKILAS PILAR SOSIAL

PGN berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Untuk itu, PGN berfokus terhadap upaya-upaya terkait pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Bagi PGN, peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan hal mendasar bagi pembangunan berkelanjutan karena masyarakat yang sejahtera dan terampil akan mampu menyokong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan demi pemenuhan kebutuhan antar generasi dengan tetap menjaga keseimbangan alam. Sehingga, seluruh kehidupan di bumi, termasuk kehidupan manusia, akan tetap terjaga.

Adapun program-program TJSL pada Pilar Sosial difokuskan untuk berkontribusi terhadap pencapaian TPB, khususnya:

- TPB No. 1 – Tanpa Kemiskinan
Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
- TPB No. 2 – Tanpa Kelaparan
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
- TPB No. 3 – Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.
- TPB No. 4 – Pendidikan Berkualitas
Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.
- TPB No. 5 – Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.

ANGGARAN DAN REALISASI PILAR SOSIAL TAHUN 2021

No	TPB	RKA Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Presentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
A	PILAR SOSIAL			
1	TPB 1	16.615.000.000	16.184.615.353	97%
2	TPB 2	790.396.647	590.396.647	75%
3	TPB 3	14.827.950.000	15.381.810.400	104%
4	TPB 4	2.550.000.000	1.250.000.000	49%
5	TPB 5	-	-	-
	TOTAL	34.783.346.647	33.406.822.400	96%

Sepanjang periode pelaporan, PGN telah menyalurkan realisasi biaya sebesar Rp33.406.822.400 (96%) dalam pilar sosial.

PROGRAM-PROGRAM TAHUN 2021

PGN melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek sesuai dengan sasaran Tujuan Pembangunan. Implementasi program TJSL mengacu pada ISO 26000 dan Kami berorientasi pada *Creating Share Value* (CSV) untuk memaksimalkan penciptaan nilai bersama agar memberikan manfaat luas kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial pada pilar sosial, PGN bekerja sama dengan 3 organisasi sosial pada beberapa program. Hal ini ditujukan agar distribusi bantuan dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu dan profesional.

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program TJSL	Dampak Program TJSL
Sosial	(1) Tanpa Kemiskinan 	Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.	Bantuan Penanggulangan Pandemi COVID-19.	137 ton Oksigen Medis 9 Isotank Disalurkan ke berbagai rumah sakit di wilayah operasi <i>East Region</i> .
			Bantuan Logistik dan Obat-obatan untuk korban Bencana Alam.	Untuk warga terdampak bencana banjir di: • Kab. Bekasi • Karawang • Subang
			Bantuan untuk Masyarakat Marginal.	Untuk warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang.
			Bantuan dalam Rangka Perayaan Keagamaan.	50.147 anak yatim di sekitar wilayah operasi mendapatkan santunan dalam rangka peringatan Nuzulul Qur'an.
			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Desa Binaan.	78 gereja mendapatkan bantuan perayaan natal.
			Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Ibadah.	3.655 penerima manfaat di Desa Binaan Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pembangunan dan rehabilitasi: • 61 masjid • 6 gereja
	(2) Tanpa Kelaparan 	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.	Bantuan Pangan dalam Rangka Perayaan Keagamaan (hewan qurban).	332 ekor kambing dan sapi disalurkan di sekitar wilayah operasi.
	(3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan 	Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.	Bantuan Peralatan dan Fasilitas Kesehatan Untuk Berbagai Rumah Sakit dan Institusi Lainnya. Program Kesehatan dan Bantuan Peralatan di Posyandu.	7 unit ambulans diberikan untuk Lembaga, Badan Hukum, dan Yayasan.
	(4) Pendidikan Berkualitas 	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.	Berbagai Program Beasiswa. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Belajar.	• 35 beasiswa untuk mahasiswa <i>Batam Tourism Polytechnic</i> . • 25 beasiswa untuk putra/putri TNI dan Polri sebagai Abdi Negara. • 104 beasiswa untuk putra/putri pensiunan dan anumerta PGN. • Pembangunan dan rehabilitasi: • 35 sekolah
	(5) Kesetaraan Gender 	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Desa Binaan.	Penerima manfaat di Desa Binaan Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan.*

*Program Desa Binaan disajikan secara lengkap pada Bab Pilar Ekonomi.

BANTUAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Pada tahun 2021, Kami berfokus pada program-program pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Per 13 April 2020, COVID-19 telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non-alam yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada kenaikan tingkat pengangguran serta kenaikan jumlah penduduk miskin. Namun demikian, secara umum dibandingkan tahun sebelumnya, persentase dan jumlah penduduk miskin tahun 2021 telah mengalami penurunan. Untuk mempercepat pemulihan kesejahteraan masyarakat,

maka PGN turut berkontribusi dalam memberikan bantuan dan perlindungan sosial, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19.

PGN memberikan bantuan berupa paket sembako, bantuan paket *sanitary kit*, masker, *hand sanitizer*, penyemprotan disinfektan dan perlengkapan APD untuk tenaga medis di berbagai daerah. PGN juga berkontribusi dalam bentuk dukungan biaya pengiriman donasi alat kesehatan dari *Major's Office City Of New York*. Selain itu, Kami juga memberi bantuan berupa alat tes COVID-19 dan pembangunan unit-unit sarana cuci tangan di beberapa perangkat desa.



PROGRAM VAKSINASI

Vaksinasi merupakan salah satu strategi untuk mengendalikan penyebaran dan penularan infeksi virus COVID-19 disamping melakukan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Vaksinasi dilakukan untuk membentuk *herd immunity* (kekebalan kelompok) secara cepat. Dengan tercapainya kondisi *herd immunity*, masyarakat diharapkan dapat terlindung dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin lengkap sebanyak dua dosis akan mendapatkan perlindungan 3x lebih

besar dibandingkan masyarakat yang tidak divaksin sama sekali.

Untuk itu, PGN melaksanakan berbagai program vaksinasi untuk mendukung pembentukan *herd immunity*, diantaranya:

- Program Vaksinasi Bersama BUMN.
- Program Vaksinasi di Manokwari, Papua.
- Program Vaksinasi di sekitar Station Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan.
- Dukungan kegiatan Vaksinasi di Kelurahan Krukut, Jakarta Barat.



PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI OKSIGEN MEDIS

Virus COVID-19 varian Delta menyebar di Indonesia dan mengalami puncaknya pada Bulan Juni 2021. Total kasus harian mencapai 20.000 kasus per hari sehingga menyebabkan peningkatan signifikan jumlah pasien yang harus dirawat di ICU. Hal ini menyebabkan kebutuhan oksigen medis yang mencapai 800 ton per hari, meningkat tajam sebesar 69,3% dibandingkan kondisi normal.

Untuk itu, PGN Group berupaya menyalurkan oksigen medis ke wilayah operasi *East Region* yang mencakup Provinsi:

- DKI Jakarta
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur

Hingga Desember 2021, PGN telah menyalurkan oksigen medis ke berbagai rumah sakit di wilayah operasi *East Region* untuk mengamankan ketersediaan pasokan oksigen medis.



137 ton
Oksigen Medis



9
Isotank

Sepanjang periode pelaporan, total bantuan COVID-19 yang disalurkan oleh PGN Group kepada masyarakat mencapai Rp15,6 miliar kepada warga yang terdampak.



BAB 8

PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

“PGN berfokus kepada implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai pondasi dasar yang dapat mendukung peningkatan kinerja Perusahaan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang”

SEKILAS PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA



Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan sekumpulan prinsip yang mendasari pengelolaan Perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan etika berusaha. Hal ini penting, karena prinsip merupakan pondasi dasar bagaimana Perusahaan beroperasi. Tentunya Perusahaan yang baik akan patuh terhadap seluruh peraturan perundangan yang berlaku, bersikap etis dan mengedepankan integritas dalam menjalankan aktivitasnya, serta menciptakan manfaat luas untuk seluruh pemangku kepentingan. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga merupakan aspek pendukung bagi pencapaian kinerja pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dalam aktivitas operasinya, PGN mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Transparan, berarti menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabel, berarti dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Bertanggungjawab, berarti mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab termasuk terhadap masyarakat dan lingkungan. Independen, berarti dikelola secara independen dan tidak diintervensi pihak lain. Wajar, berarti memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Seluruh upaya terkait implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga difokuskan untuk berkontribusi terhadap pencapaian TPB, khususnya:

- TPB No (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Perdamaian
Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak termasuk untuk lembaga, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Pedoman Tata Kelola, Pedoman Etika dan Integritas, serta Prakarsa Internasional

PGN telah memiliki sekumpulan kebijakan dan pedoman dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. PGN juga telah mengimplementasikan berbagai standar dan Prakarsa internasional sebagai upaya membangun kultur perusahaan yang akuntabel dan bertanggungjawab. Selain itu, PGN juga memiliki berbagai pedoman terkait etika dan integritas. Seluruh kebijakan, pedoman, dan standar tersebut ditujukan untuk membangun sebuah Perusahaan yang berkinerja tinggi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang; bertanggungjawab, akuntabel, etis, dan memiliki integritas yang tinggi.

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- Board Manual
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja
- Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi
- Pedoman Whistleblowing System
- Pedoman Manajemen Risiko
- Pedoman Piagam Audit Internal
- Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan
- Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

PEDOMAN ETIKA USAHA

- Etika Perseroan dengan Pekerja
- Etika Perseroan dengan Pelanggan
- Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa
- Etika Perseroan dengan Kreditur
- Etika Perseroan dengan Pemerintah
- Etika Perseroan dengan Masyarakat
- Etika Perseroan dengan Pemegang Saham
- Etika Perseroan dengan Pemasok Gas Bumi

PEDOMAN ETIKA KERJA

- Komitmen Individu
- Kerjasama Antar Insan PGN
- Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
- Benturan Kepentingan
- Penerima Hadiah
- Pemberi Hadiah
- Perlindungan Aset PGN
- Mencatat Data dan Pelaporan
- Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan
- Aktifitas Politik
- Integritas Laporan Keuangan
- Informasi Orang Dalam (Insider Trading)
- Penggunaan Media Sosial

ANTI - KORUPSI

- Pakta Integritas
- Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi

STANDAR DAN PRAKARSA INTERNASIONAL

- ISO 37001 Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- ISO 26000 Pedoman Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan
- ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3
- ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
- ISO 27001:2018 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- ISO 31000:2018 Sistem Manajemen Risiko
- ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset Mekanisme Pengaduan

Pedoman dan kebijakan tersebut disosialisasikan secara berkala, baik dalam bentuk tatap muka (daring) secara berkala maupun melalui media digital seperti media sosial PGN, portal PGN, website, dan e-mail kepada Perwira PGN.

Mekanisme Pelaporan Whistle Blowing System

PGN memiliki sistem pelaporan untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap aturan perusahaan, etika bisnis, diskriminasi, maupun tindakan penipuan. Laporan ditujukan kepada Komite Etik dan PGN melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

Upaya Penguatan Tata Kelola Tahun 2021

- Sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh insan PGN, diikuti dengan uji pemahaman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku bagi setiap karyawan.
- Penerapan aplikasi GOLS (*GCG Online System*) sebagai sarana meningkatkan kepedulian Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi karyawan PGN.
- Peningkatan kepedulian Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui media digital.
- Melakukan pengukuran dan penilaian tingkat pemahaman karyawan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilakukan oleh konsultan independent dengan mengacu pada Parameter SK MENTERI BUMN No. 16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.
- Penandatanganan Komite Bersama BOD & BOC dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai prinsip TARIF dan penerapan Etika Usaha dan Etika Kerja sesuai Budaya AKHLAK.
- Pembaharuan atau revisi atas beberapa dokumen Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai perkembangan Perusahaan.

- Penyelesaian rekomendasi hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2021 secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Manajemen dan Komite NRGCG secara berkala.

Upaya Penguatan Budaya Perusahaan

PGN turut mengimplementasikan *core values* BUMN AKHLAK sebagai budaya Perusahaan melalui Program:

- *Ethics Ambassador*: Program sosialisasi dan penerapan nilai-nilai Etika Usaha & Etika Kerja di setiap Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi.
- *Coffee Morning Briefing Online* (C'Mon Bro): Rapat koordinasi rutin masing-masing Satuan Kerja yang berfokus pada program kerja dan upaya pencapaian target kinerja.
- *Cross Sharing*: Program berbagi pengetahuan yang menghadirkan narasumber dari Satuan Kerja lain di lingkungan Pertamina Group sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kerja.
- Energi Baik BerAKHLAK: Kegiatan olahraga bersama untuk memperkuat semangat internalisasi nilai-nilai AKHLAK.
- *Sharing dan Coaching* (SharChing): Program berbagi pengetahuan dan program *coaching* yang dilakukan oleh sesama Perwira Sub-holding Gas.

PGN juga melakukan penguatan budaya Perusahaan sebagai berikut:

- Surat Edaran Anti Pelecehan Seksual di Lingkungan Sub-holding Gas, untuk mencegah adanya tindakan pelecehan seksual.
- *Cross Talent Mobility*, untuk penguatan kompetensi dan *melting culture*.
- *Millennials Empowering*, untuk menguatkan kompetensi millennials dalam rangka akselerasi program pengembangan pekerja millennials.
- *Employee Engagement Survey* yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.



4,07
Employee
Engagement



98.56 (Good)
ACGS



98.56 (Very Good)
Asesmen Penerapan
GCG



Nil
Kasus Pelanggaran
Kode Etik & Korupsi





BAB 9

LAIN-LAIN

“Seluruh kegiatan TJSL yang Kami lakukan berorientasi kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berpedoman kepada ISO 26000. Seluruh kegiatan TJSL melewati tahapan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dan pedoman, serta pengawasan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan TJSL serta perbaikan ke depan.”

NAMA AUDITOR/KAP, TEMUAN AUDITOR, JENIS PEMERIKSAAN, DAN OPINI SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Uraian	2021	2020
Nama Auditor	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)
Temuan Auditor	-	-
Jenis Pemeriksaan	Audit ETAP	Audit ETAP
Opini	Wajar dalam semua hal yang Material	Wajar dalam semua hal yang Material

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDITOR DAN TEMUAN AUDITOR YANG BELUM DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Tidak ada temuan di tahun 2019 maupun di tahun 2020, sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS, KEMENTERIAN BUMN, DAN DEWAN KOMISARIS/ PENGAWAS ATAS TJSL

RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2021 menyetujui untuk menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021.

KESIMPULAN

1. Pada Tahun 2021, terdapat peralihan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program Kemitraan (PK) berganti nama menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Program Bina Lingkungan (BL) yang semula berorientasi kepada bantuan terhadap 7 aspek (korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, serta sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan) berganti menjadi berorientasi terhadap 4 pilar (sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola). 4 pilar ini kemudian dipetakan kedalam poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Peralihan ini merupakan amanat Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Pergantian PKBL menjadi TJSL dimaksudkan agar program TJSL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya serta merupakan bagian yang tidak terpisah dan terintegrasi dengan aktivitas operasi Perusahaan.
3. Untuk kegiatan PUMK, pada tahun pelaporan PGN berfokus pada usaha pemulihan kualitas pinjaman, khususnya pinjaman dengan status diragukan dan macet.
 - a. Berikut jumlah portofolio kelolaan PGN per 31 Desember 2022:

Portofolio	Jumlah	Status
Mitra Penyalur BUMN	Rp177,97 miliar	Dialihkan ke PT PNM dalam bentuk hibah
Skema Penyaluran Langsung Kepada Individu dan Sinergi BUMN	• Rp12,3 miliar (Kas) • Rp54 miliar (Piutang Bermasalah Mitra Binaan) • Rp7,24 miliar (Piutang BUMN Penyalur) • Rp110,7 miliar (Piutang bermasalah BUMN Penyalur)	Dikelola mandiri oleh PGN

4. Realisasi pengembalian pinjaman dari mitra binaan dan lembaga penyalur masing-masing 65,37% dan 3% dari target yang ditetapkan.
5. Untuk kegiatan TJSL 4 Pilar Utama (Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola) pada tahun pelaporan PGN mengeluarkan total biaya Rp49,4 miliar (95% dari anggaran). Pandemi COVID-19 yang masih melanda pada Tahun 2021 menyebabkan PGN berfokus pada program-program pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Sepanjang periode pelaporan, total bantuan COVID-19 yang disalurkan oleh PGN Group kepada masyarakat mencapai Rp15,6 miliar.
6. PGN juga berfokus kepada pelaksanaan program Desa Binaan di Desa Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan. Program Desa Binaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat desa; serta menyediakan akses atau permodalan melalui koperasi dan Unit BUMDES untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Selama tahun pelaporan, program Desa Binaan memberikan manfaat kepada 3.655 warga desa Binaan.
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Desa Binaan Pagardewa untuk menilai kepuasan masyarakat menunjukkan nilai 91,35 dengan nilai mutu pelayanan kategori A dengan predikat Sangat Puas.
8. Pada tahun pelaporan kami melakukan penyempurnaan SOP TJSL PGN untuk menyesuaikan dengan perubahan dunia bisnis yang dinamis serta meningkatkan kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungan kami.
9. Pada tahun mendatang, pelaksanaan TJSL tetap berorientasi kepada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berpedoman pada ISO 26000. Kami mencanangkan program TJSL yang selaras dan sinergis di seluruh PGN Group.
10. Mulai tahun depan, kami juga akan kembali menyalurkan pinjaman pada program PUMK dan kembali melakukan Kegiatan Pembinaan untuk seluruh mitra binaan dengan tetap berfokus pada upaya pemulihan kualitas pinjaman.

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PEMEGANG SAHAM

Terdapat arahan dari Kementerian BUMN melalui S-1029/MBU/12/2021 untuk menerapkan kebijakan stimulus kepada Mitra Binaan sampai dengan Maret 2023. Penerapan kebijakan stimulus ini meliputi Kebijakan restrukturisasi pinjaman Pendanaan UMK serta Kebijakan penundaan pembayaran kewajiban angsuran pinjaman Pendanaan UMK.

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN KEPUTUSAN DALAM RUPS

1. Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2021.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan TJSL. Pembebasan tanggung jawab ini mencakup banyak hal sejauh tindakan tersebut tertulis dalam laporan TJSL yang telah diaudit oleh Auditor tahun sebelumnya.
3. Penetapan Auditor atas Laporan Keuangan TJSL untuk tahun buku 2022.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
(DAHULU UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN)
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

**LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Muhamad Haryo Yunianto

Jabatan : Direktur Utama

Alamat Kantor : Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140, Indonesia

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Gas Negara Tbk.;
2. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Gas Negara Tbk. telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK-ETAP");
3. Menyatakan bahwa:
 - a) Seluruh informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Gas Negara Tbk. telah disajikan dengan lengkap dan benar;
 - b) Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Gas Negara Tbk. tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material; dan
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2022
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.


Muhamad Haryo Yunianto
Direktur Utama



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PENGURUS PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

Kami telah mengaudit laporan keuangan unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Gas Negara Tbk. terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK-ETAP") dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian yang wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini atas audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Gas Negara Tbk. tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai SAK-ETAP.

JAKARTA,
28 Februari 2022

Daniel Kohar, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1130

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	12,313,542,900	12,000,486,179
Piutang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") penyalur, bersih	5	-	-
Piutang lain-lain, bersih	7	-	-
Jumlah aset lancar		<u>12,313,542,900</u>	<u>12,000,486,179</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang bermasalah pinjaman mitra binaan, bersih	6	-	-
Piutang bermasalah BUMN penyalur, bersih	8	-	-
Jumlah aset tidak lancar		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET		<u>12,313,542,900</u>	<u>12,000,486,179</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kelebihan pembayaran angsuran		<u>4,125,486</u>	<u>4,125,486</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>4,125,486</u>	<u>4,125,486</u>
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat		<u>12,309,417,414</u>	<u>11,996,360,693</u>
Jumlah aset neto		<u>12,309,417,414</u>	<u>11,996,360,693</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>12,313,542,900</u>	<u>12,000,486,179</u>

LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN	9		
Pendapatan jasa giro		230,882,577	195,424,274
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		13,905,000	190,796,000
Pendapatan lain-lain		-	185,622,048
JUMLAH PENDAPATAN		<u>244,787,577</u>	<u>571,842,322</u>
PEMULIHAN/(BEBAN)			
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	11	114,445,660	1,677,825,211
Beban administrasi dan umum		(46,176,516)	(39,652,608)
Penyaluran bina lingkungan	10	-	(156,885,955)
JUMLAH PEMULIHAN, NET		<u>68,269,144</u>	<u>1,481,286,648</u>
KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		<u>313,056,721</u>	<u>2,053,128,970</u>
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>11,996,360,693</u>	<u>9,943,231,723</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>12,309,417,414</u>	<u>11,996,360,693</u>

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pengembalian pinjaman dari BUMN penyalur	-	1,666,668,784
Pengembalian pinjaman piutang bermasalah mitra binaan	78,445,660	80,590,000
Pengembalian pinjaman piutang bermasalah BUMN penyalur	36,000,000	500,000,000
Pendapatan jasa giro	230,882,577	195,424,274
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	13,905,000	190,796,000
Pengembalian sisa dana BUMN peduli	-	51,000,000
Pendapatan lain-lain	-	84,022,048
Penyaluran dana bina lingkungan	-	(54,000,000)
Beban administrasi dan umum	<u>(46,176,516)</u>	<u>(39,652,608)</u>
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	<u>313,056,721</u>	<u>2,674,848,498</u>
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	313,056,721	2,674,848,498
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	<u>12,000,486,179</u>	<u>9,325,637,681</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>12,313,542,900</u>	<u>12,000,486,179</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
("PUMK")**

a. Pendirian dan informasi umum

PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") merupakan entitas anak PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang transmisi dan niaga gas bumi di Indonesia dan berkomitmen untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* ("CSR") melalui Program PUMK yang diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL"). PGN membentuk Divisi CSR yang fungsi utamanya mengelola TJSL, berdasarkan:

- (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Peraturan Menteri Negara ("Meneg") BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 sebagai pengganti Surat Keputusan ("SK") Meneg BUMN KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 sebagai pengganti SK Menteri Keuangan No. 316/KMK/016/1994 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba BUMN, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri ("Permen") BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, dan Permen BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017.
- (3) Surat Edaran ("SE") Meneg BUMN No. 21/MBU/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan BUMN.
- (4) SE Meneg BUMN No. 07/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan dan penetapan pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- (6) SK Direksi PGN No. 006100.K/OT.00/UT/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi President Director's Office, Strategy and Business Development Directorate and Human Capital and General Services Directorate PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan Surat Penugasan Division Head, Human Capital Management.
- (7) SK Direksi PGN No. 0017500.K/OT.00/DPO/2016 tanggal 1 Desember 2016 merubah SK Direksi PGN Nomor 006100.K/OT00/UT/2015 tentang Struktur Organisasi Finance Directorate PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan struktur organisasi Corporate Social Responsibility Division.
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (9) Keputusan Direksi Nomor 035400.K/OT.00/PDO/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Bilahan Struktur Organisasi Dasar (BOD-1) Subholding/Business Group Gas.
- (10) SK Direksi PGN No. 035500.K/OT.00/PDO/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan struktur organisasi CSR Division.
- (11) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
("PUMK") (lanjutan)**

b. Kegiatan utama

Kegiatan operasional Program PUMK adalah sebagai berikut:

Program PUMK merupakan program yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; dan
6. Usaha calon UMK Binaan telah berjalan minimal selama 6 (enam) bulan; dan
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non-Bank.

Dana Program PUMK diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

c. Sumber dana

Sumber dana Program PUMK berasal dari:

1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
2. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau;
5. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
("PUMK") (lanjutan)**

d. Susunan pengurus

Pengurus Program PUMK adalah Divisi CSR PGN. Kantor Divisi CSR beralamat di Gedung Graha PGAS, Jl. Kyai H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat.

Pengurus pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Direktur Pembina TJSL dan Direktur Utama	: Muhamad Haryo Yunianto
Pembina TJSL	: Rachmat Utama
Kepala Divisi	: Anak Agung Raka Haryana
Kepala Departemen Operasional	: Sigit Tri Hartanto Sukamto
Kepala Departemen Perencanaan dan Pengawasan	: Tubagus Nurcholis

Pengurus pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Direktur Pembina dan Direktur Utama	: Suko Hartono
Kepala Divisi	: Anak Agung Raka Haryana
Kepala Departemen Operasional	: Sigit Tri Hartanto Sukamto
Kepala Departemen Perencanaan dan Pengawasan	: Tubagus Nurcholis

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan TJSL PGN telah disusun dan diselesaikan oleh Pengurus pada tanggal 28 Februari 2022.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") di Indonesia dengan memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi TJSL Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi TJSL Revisi 2012. Kedua surat edaran tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Piutang kepada BUMN penyalur

Piutang kepada BUMN penyalur merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar BUMN. Piutang kepada BUMN penyalur diakui pada saat terjadi penyerahan dana kepada BUMN penyalur serta dicatat sebesar jumlah neto dana yang diserahkan kepada BUMN penyalur, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

d. Piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh TJSL kepada mitra binaan. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur sebesar jumlah neto dana yang diserahkan kepada mitra binaan, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Piutang lain-lain merupakan piutang jasa administrasi atas pinjaman yang sudah jatuh tempo dan piutang pengembalian sisa dana BUMN peduli dari BUMN lain.

Piutang pinjaman mitra binaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tidak lancar sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

Penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- ii. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iii. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iv. Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penggolongan kualitas pinjaman diatas memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Akuntansi.

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada (minimal 2 tahun).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang (lanjutan)

Perhitungan penyisihan piutang BUMN penyalur dilakukan secara individual. Perhitungan ini telah memperhitungkan nilai terpulihkan dari arus kas yang akan diterima TJSL di masa depan selama periode pembayaran.

f. Piutang pinjaman bermasalah

Piutang pinjaman bermasalah merupakan piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya melalui penjadwalan ulang dan rekondisi, namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah. Di tahun 2017, Pengurus secara formal melalui Nota Dinas No. 101500.ND/HM.05.03/CSR/2017 dari Kepala Divisi CSR kepada Direktur Pembina PKBL dan Direktur Keuangan BUMN Pembina, mendefinisikan piutang pinjaman bermasalah sebagai piutang Program Kemitraan dengan kriteria sebagai berikut:

- tidak terdapat pengembalian piutang yang substansial meskipun telah dilakukan upaya pemulihan pinjaman dan konfirmasi piutang selama 3 tahun; dan/atau
- pinjaman telah berusia lebih dari 10 tahun.

Alokasi pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang piutang pinjaman bermasalah dan disajikan sebagai aset tidak lancar.

g. Kelebihan pembayaran angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang mitra binaan. Kelebihan pembayaran angsuran diakui sebagai liabilitas pada saat setoran tersebut diterima oleh TJSL. Kelebihan pembayaran angsuran diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kelebihan pembayaran angsuran. Kelebihan pembayaran angsuran disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek.

h. Aset bersih

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

i. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui dalam Laporan Aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut:

- i. Jumlah pendapatan diukur secara andal;
- ii. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir ke dalam TJSL; dan
- iii. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan jasa administrasi diakui hanya untuk piutang dengan kualitas lancar dan kurang lancar, dan diukur berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak dengan ketentuan manfaat ekonomis atas jasa administrasi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke dalam TJSL.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Transaksi dengan pihak berelasi

TJSL telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan TJSL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan TJSL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas TJSL;
- memiliki pengaruh signifikan atas TJSL; atau
- merupakan personil manajemen kunci TJSL atau entitas induk TJSL.

Suatu entitas berelasi dengan TJSL jika memenuhi salah satu hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- TJSL dengan BUMN;
- TJSL dengan TJSL lain dimana kedua TJSL tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- TJSL atau individu yang mengendalikan TJSL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh TJSL pelapor.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dan piutang lain-lain, Pengurus mempertimbangkan umur piutang dan melakukan perhitungan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yaitu umur piutang. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

Perhitungan penyisihan piutang BUMN penyalur dilakukan secara individual dengan memperhitungkan estimasi nilai yang dapat ditagih berdasarkan arus kas yang akan diterima TJSL di masa depan selama periode pembayaran.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	<u>12,313,542,900</u>	<u>12,000,486,179</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>12,313,542,900</u>	<u>12,000,486,179</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

5. PIUTANG BUMN PENYALUR

Piutang BUMN penyalur adalah pinjaman yang diberikan kepada TJSL BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar TJSL sebagaimana diinstruksikan oleh Meneg BUMN. Piutang kepada BUMN penyalur terdiri dari piutang dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Perkebunan Nusantara ("PTPN") IX	<u>7,245,215,650</u>	<u>7,245,215,650</u>
Jumlah sebelum penyisihan penurunan nilai piutang	7,245,215,650	7,245,215,650
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang dari BUMN penyalur	<u>(7,245,215,650)</u>	<u>(7,245,215,650)</u>
Jumlah piutang BUMN penyalur, bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN penyalur adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	7,245,215,650	7,246,395,375
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>-</u>	<u>(1,179,725)</u>
Saldo akhir	<u>7,245,215,650</u>	<u>7,245,215,650</u>

Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai diakui pada pendapatan lain-lain dalam laporan aktivitas dan untuk kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai diakui pada beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman.

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pengurus melakukan *rescheduling* atas piutang PTPN IX berdasarkan permintaan dari BUMN penyalur. Berikut ini adalah uraian perjanjian *rescheduling* yang telah disepakati TJSL dengan PTPN IX.

Perjanjian penjadwalan kembali piutang dengan PTPN IX

TJSL PGN melakukan kerja sama penyaluran Program Kemitraan dengan PTPN IX melalui kontrak kerja sama No. 007600.K/HM.05/KEU2014. Pada tanggal 28 Desember 2015, TJSL PGN dan PTPN IX melakukan penjadwalan kembali sebesar Rp25.000.000.000 dengan biaya administrasi senilai Rp3.914.984.479. Pelunasan dilakukan bertahap mulai periode 2015 sampai 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang dari PTPN IX telah jatuh tempo seluruhnya. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan ini, belum ada kesepakatan antara Pengurus dan PTPN IX untuk melakukan *rescheduling* pembayaran piutang tersebut. Oleh karena itu, Pengurus sudah melakukan pencadangan seluruhnya atas piutang PTPN IX.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

6. PIUTANG BERMASALAH PINJAMAN MITRA BINAAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Piutang pinjaman dari mitra binaan	54,025,588,636	54,104,034,296
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(54,025,588,636)</u>	<u>(54,104,034,296)</u>
Piutang bermasalah pinjaman dari mitra binaan, bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	54,104,034,296	55,151,739,162
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(78,445,660)</u>	<u>(1,047,704,866)</u>
Saldo akhir	<u>54,025,588,636</u>	<u>54,104,034,296</u>

Analisis saldo piutang bermasalah pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sektor perdagangan	16,837,075,299	16,839,075,299
Sektor jasa	13,765,950,330	13,773,250,330
Sektor industri	13,739,397,591	13,795,543,251
Sektor peternakan	5,275,673,013	5,288,673,013
Sektor pertanian	1,919,055,043	1,919,055,043
Sektor perikanan	903,361,334	903,361,334
Sektor perkebunan	215,436,416	215,436,416
Sektor lain	<u>1,369,639,610</u>	<u>1,369,639,610</u>
Jumlah piutang bermasalah pinjaman mitra binaan	54,025,588,636	54,104,034,296
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(54,025,588,636)</u>	<u>(54,104,034,296)</u>
Piutang bermasalah pinjaman mitra binaan, bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

6. PIUTANG BERMASALAH PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

Analisis saldo piutang bermasalah pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Jawa Barat	14,877,661,157	14,897,961,157
DKI Jakarta	8,660,830,944	8,701,497,604
Jawa Tengah	8,127,305,638	8,127,305,638
Sumatera Selatan	5,608,203,395	5,608,203,395
Jawa Timur	4,768,576,057	4,769,576,057
Sumatera Utara	2,612,519,733	2,612,519,733
D.I. Yogyakarta	2,554,195,539	2,568,674,539
Jambi	1,788,690,304	1,788,690,304
Lampung	1,356,202,000	1,356,202,000
Banten	960,430,283	960,430,283
Riau	953,780,717	953,780,717
Sulawesi Selatan	722,162,869	724,162,869
Sumatera Barat	481,320,000	481,320,000
Bali	229,260,000	229,260,000
Papua Barat	193,500,000	193,500,000
Sulawesi Barat	65,950,000	65,950,000
Aceh	45,000,000	45,000,000
Kepulauan Bangka Belitung	20,000,000	20,000,000
Jumlah piutang bermasalah pinjaman mitra binaan	54,025,588,636	54,104,034,296
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(54,025,588,636)	(54,104,034,296)
Piutang bermasalah pinjaman mitra binaan, bersih	-	-

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri atas piutang jasa administrasi atas pinjaman yang sudah jatuh tempo.

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

	2021	2020
Piutang jasa administrasi	689,691,467	689,691,467
Dikurangi dengan:		
Penghapusan piutang jasa administrasi	(689,691,467)	-
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(689,691,467)
Piutang jasa administrasi, bersih	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang jasa administrasi adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo awal	689,691,467	818,632,087
Penghapusan penyisihan kerugian penurunan nilai	(689,691,467)	-
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(128,940,620)
Saldo akhir	-	689,691,467

8. PIUTANG BERMASALAH BUMN PENYALUR

	2021	2020
PT Sang Hyang Seri (Persero) ("SHS")	73,715,000,000	73,715,000,000
PT Pertani (Persero) ("Pertani")	36,987,000,000	37,023,000,000
	110,702,000,000	110,738,000,000
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(110,702,000,000)	(110,738,000,000)
Piutang pinjaman bermasalah, bersih	-	-

Mutasi piutang bermasalah selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo awal	110,738,000,000	111,238,000,000
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	(36,000,000)	(500,000,000)
Saldo akhir	110,702,000,000	110,738,000,000

Pinjaman kepada SHS

TJSL memberikan pinjaman kepada SHS sejumlah Rp80.000.000.000 pada tahun 2012 dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan semula akan dilunasi secara bertahap selama tahun 2013. Pada tanggal 13 Desember 2013, PGN menyetujui permohonan SHS untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman (*rescheduling*) sampai dengan tahun 2016. Saldo piutang pinjaman kepada SHS pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah karena TJSL berpendapat bahwa piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

8. PIUTANG BERMASALAH BUMN PENYALUR (lanjutan)

Pinjaman kepada Pertani

Pada tahun 2012, TJSL memberikan pinjaman kepada Pertani sejumlah Rp77.000.000.000 dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada GP3K. Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan semula akan dilunasi secara bertahap selama tahun 2013. Pada tanggal 13 Desember 2013, TJSL menyetujui permohonan Pertani untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan bulan April 2014, kemudian menyetujui rekondisi pada tanggal 30 Juni 2014. Saldo piutang pinjaman kepada Pertani pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah karena TJSL berpendapat bahwa piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih. Pada tanggal 12 September 2021 dan 17 September 2021 Pertani melakukan penyetoran angsuran masing-masing senilai Rp20.000.000 dan Rp16.000.000. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 Pertani dinyatakan bubar dan melebur dengan PT Sang Hyang Seri. TJSL masih berpegang pada kontrak dasar yaitu dengan Pertani.

9. PENDAPATAN

	2021		
	Program PUMK	Program TJSL	Jumlah
Jasa giro	230,882,577	-	230,882,577
Jasa administrasi pinjaman	13,905,000	-	13,905,000
Jumlah	244,787,577	-	244,787,577
	2020		
	Program PUMK	Program TJSL	Jumlah
Jasa giro	195,208,077	216,197	195,424,274
Jasa administrasi pinjaman	190,796,000	-	190,796,000
Pendapatan lain-lain	185,622,048	-	185,622,048
Jumlah	571,626,125	216,197	571,842,322

Termasuk dalam pendapatan lain-lain di 2021 adalah pengembalian dari pinjaman piutang bermasalah senilai nil (2020: Rp544.400.000).

10. PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN

Penyaluran dana bina lingkungan dilakukan kepada sektor-sektor berikut:

	2021	2020
Sarana dan/atau prasarana umum	-	74,885,955
Kesehatan	-	61,000,000
Pendidikan	-	21,000,000
Jumlah	-	156,885,955

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

11. PEMULIHAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PIUTANG PINJAMAN

Rincian atas beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pemulihan kerugian penurunan nilai - piutang bermasalah BUMN penyalur (Catatan 8)	36,000,000	500,000,000
Pemulihan kerugian penurunan nilai - piutang bermasalah pinjaman mitra binaan (Catatan 6)	78,445,660	1,047,704,866
Pemulihan penurunan nilai - piutang lain-lain (Catatan 7)	-	128,940,620
Pemulihan penyisihan penurunan nilai - BUMN penyalur (Catatan 5)	-	1,179,725
Jumlah	114,445,660	1,677,825,211

12. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

Selama tahun 2021 dan 2020, TJSL melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak dan sifat dari transaksi-transaksi pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Transaksi
BRI, Bank Negara Indonesia ("BNI")	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Penempatan dana pada rekening bank
PTPN IX, SHS, Pertani, PT Garam	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Kerja sama penyaluran dana Program Kemitraan
Rincian transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:		
	2021	2020
Jasa administrasi pinjaman		
PTPN IX dan PT Garam	-	180,000,000
	2021	2020
Pengembalian piutang pinjaman dari BUMN penyalur dan piutang bermasalah		
Pertani	36,000,000	500,000,000
PT Garam	-	1,666,668,784
	36,000,000	2,166,668,784
	2021	2020
Pendapatan jasa giro		
BRI	230,882,577	195,208,077
BNI	-	216,197
	230,882,577	195,424,274

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

12. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aset		
Kas dan setara kas (Catatan 4)	12,313,542,900	12,000,486,179
Piutang bermasalah (Catatan 8)	110,702,000,000	110,738,000,000
Piutang BUMN penyalur (Catatan 5)	<u>7,245,215,650</u>	<u>7,245,215,650</u>
	<u>130,260,758,550</u>	<u>129,983,701,829</u>

13. WABAH COVID-19

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, telah terjadi wabah penyakit COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap permintaan produk, layanan dan rantai pasokan untuk usaha-usaha dari mitra binaan. Manajemen telah mengkaji dampak dari peristiwa tersebut terhadap aktivitas TJSL Perusahaan. Berdasarkan hasil kajian saat ini, manajemen berkeyakinan bahwa, dampak negatif jangka pendek tersebut telah dipertimbangkan dan dapat diatasi melalui kebijakan manajemen.

Manajemen akan terus memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait dengan peristiwa ini di masa depan.

Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2021

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20

Jakarta 11140 Indonesia

T 633 4848, 633 4838

F 6221 633 3080

E contact.center@pgn.co.id

www.pgn.co.id